

**PERAN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DALAM MENGATASI
KERAWANAN PANGAN DI PALESTINA TAHUN 2018 - 2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

AROHMAN SHIDIQ AHMADI

21323057

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**PERAN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DALAM MENGATASI
KERAWANAN PANGAN DI PALESTINA TAHUN 2018 - 2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

AROHMAN SHIDIQ AHMADI

21323057

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Peran World Food Programme (WFP) dalam Mengatasi Kerawanan Pangan di Palestina Tahun 2018-2022
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



21 Oktober 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 3 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

21 Oktober 2025



Arohman Shidiq Ahmadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	14
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	14
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	14
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	14
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	14
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2 KERAWANAN PANGAN DAN MUNCULNYA WORLD FOOD PROGRAMME DI PALESTINA	17
2.1 Permasalahan Kerawanan Pangan di Palestina	17
2.2 Faktor Penyebab dan Dampak Kerawanan Pangan Palestina	20
2.3 Masuknya World Food Programme di Palestina	24
2.4 Country Strategic Plan (CSP) WFP di Palestina 2018–2022	27
<i>2.4.1 Tujuan dan Penerapan CSP di Palestina 2018-2022</i>	29
BAB 3 ANALISIS PERAN WORLD FOOD PROGRAMME DALAM MENGATASI KERAWANAN PANGAN DI PALESTINA MENURUT TEORI ORGANISASI INTERNASIONAL OLEH CLIVE ARCHER	34
3.1 Fungsi International Organizations Clive Archer dalam Analisis Peran WFP di Palestina	34
3.2 Penerapan Fungsi <i>Rule Making</i> WFP di Palestina	36
3.3 Penerapan Fungsi Norma WFP di Palestina	38
3.4 Operasional Bantuan WFP Melalui <i>Country Strategic Plan</i>	41
<i>3.4.1 Aktor Donor WFP ke Palestina Periode Tahun 2018-2022</i>	47

3.5 Peran Artikulasi dan Agregasi WFP melalui Country Strategic Plan dan Kemitraan (2018-2022)	49
3.6 Peran WFP sebagai Sumber Informasi terkait Kerawanan Pangan Palestina	52
3.7 Tantangan WFP di Palestina dan Analisis Perbandingan terhadap Implementasi WFP	56
BAB 4 PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Rekomendasi	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Populasi Kerawanan Pangan Palestina 2018-2022.....	18
Tabel 2. Distribusi Bantuan Pangan dan CBT Tahunan 2018-2022.....	42
Tabel 3. Operasional WFP melalui Aktor Kemitraan dalam <i>Strategic Outcome</i> 3.....	45
Tabel 4. Aktor Donor untuk WFP di Palestina (Per 24 November 2022).....	47
Tabel 7. Fungsi Informasi WFP di Palestina (2018-2022).....	50

DAFTAR SINGKATAN

ACF	: Action Against Hunger
ACR	: Annual Country Report
ARIJ	: Applied Research Institute Jerusalem
CBT	: Cash Based Transfers
CSP	: Country Strategic Plan
EU	: European Union
FAO	: Food and Agriculture Organization
FSIN	: Food Security Information Network
GRFC	: Global Report Food Crises
HNO	: Humanitarian Needs Overview
IFAD	: International Fund for Agricultural Development
ILO	: International Labour Organization
Juzoor	: Juzoor for Health and Social Development
MA'AN	: MA'AN Development Center
MoSD	: Ministry of Social Development
MOU	: Memorandum of Understanding
mVAM	: mobile Vulnerability Analysis and Mapping
NGO	: Non-Governmental Organization
OCHA	: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCBS	: Palestinian Central Bureau of Statistics
SBCC	: Social and Behavior Change Communication
SGD Fund	: Sustainable Development Goals Fund
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UNDP	: United Nations Development Programme
UNRWA	: United Nations Relief and Works Agency
VAM	: Vulnerability Analysis and Mapping
WFP	: World Food Programme

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina dalam periode tahun 2018-2022 sesuai dengan program *Country Strategic Plan* WFP. Kerawanan pangan di wilayah ini merupakan isu krusial yang diperparah oleh konflik berkepanjangan, blokade, tantangan ekonomi, dan dampak pandemi COVID-19, yang memuncak pada 2 juta jiwa terdampak pada tahun 2020. Menggunakan teori Organisasi Internasional Clive Archer, penelitian ini berfokus pada fungsi operasional, artikulasi dan agregasi, serta informasi WFP. Argumen sementara menunjukkan bahwa WFP berperan sentral melalui program bantuan langsung, fasilitasi kerja sama internasional, dan sebagai informasi kebijakan bantuan pangan. Temuan menunjukkan WFP secara konsisten menyalurkan bantuan pangan dan transfer berbasis uang tunai (CBT) kepada ratusan ribu jiwa, secara adaptif meningkatkan respon saat pandemi, dan menghadapi tantangan pendanaan. WFP juga memperkuat kapasitas institusi nasional Palestina dan memperluas kemitraan, termasuk dengan sektor swasta, untuk efisiensi distribusi. Selain itu, WFP berperan vital sebagai sumber informasi otoritatif melalui pengumpulan dan penyebaran data, yang mempengaruhi alokasi sumber daya dan strategi intervensi global.

Kata-kata kunci: Bantuan Kemanusiaan, Konflik, Kerawanan Pangan, Organisasi Internasional, Palestina, World Food Programme (WFP).

ABSTRACT

This study analyzes the role of the World Food Programme (WFP) in addressing food insecurity in Palestine during the period 2018-2022 in accordance with the WFP Country Strategic Plan. Food insecurity in this region is a critical issue exacerbated by prolonged conflict, economic blockades, and the impact of the COVID-19 pandemic, which peaked at 2 million people affected in 2020. Using Clive Archer's theory of International Organizations, this study focuses on the operational functions, articulation and aggregation, and information of the WFP. Preliminary findings suggest that WFP plays a central role through direct assistance programs, facilitating international cooperation, and as a policy instrument. Findings indicate that WFP consistently distributes food aid and cash-based transfers (CBT) to hundreds of thousands of people, adaptively enhancing its response during the pandemic, and addressing funding challenges. The WFP also strengthens the capacity of Palestinian national institutions and expands partnerships, including with the private sector, for distribution efficiency. Additionally, the WFP plays a vital role as an authoritative source of information through data collection and dissemination, influencing resource allocation and global intervention strategies.

Keywords: Conflict, Food insecurity, Humanitarian Aid, International Organizations, Palestine, World Food Programme (WFP).

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak dari setiap individu karena pangan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk keberlanjutan hidup manusia. Menurut Dewan Ketahanan Pangan, kerawanan pangan adalah kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat, atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan makanan bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat (Dewan Ketahanan Pangan 2006). Kondisi ini bisa bersifat kronis atau muncul secara temporer akibat keadaan darurat. Menurut World Food Programme (WFP) kerawanan pangan adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi yang memadai terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet aktif dan sehat (WFP, State of Food Security and Nutrition in the World 2022). Definisi ini mencerminkan bahwa kerawanan pangan bukan hanya persoalan kelangkaan makanan secara fisik, melainkan juga menyangkut dimensi kualitas gizi, keamanan pangan, dan akses sosial-ekonomi masyarakat terhadap pangan tersebut.

Di setiap negara memiliki kemungkinan mengalami kerawanan pangan karena tidak adanya pemenuhan pangan yang cukup sebagai kebutuhan dasar. Penyebab munculnya kerawanan pangan ini bisa dari berbagai faktor seperti kesulitan distribusi, perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, serta konflik sosial, termasuk peperangan (Zaini et al. 2019). Salah satu contoh negara yang

kini sedang mengalami kerawanan pangan adalah Palestina, negara ini mengalami kerawanan pangan karena faktor krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan. Palestina sendiri merupakan negara yang terletak di bagian barat benua Asia yang memiliki luas wilayah 6.220 km persegi dan memiliki penduduk 4.295 jiwa yang terhitung pada tahun 2016 (PCBS 2024). Palestina memiliki sumber daya alam utama yaitu tanaman palem, zaitun, anggur, gandum, kapas, rami. Walaupun Palestina memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, namun hal ini masih belum bisa untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakatnya.

Kerawanan pangan di Palestina ini dilatarbelakangi karena kerawanan pangan terjadi karena kombinasi faktor struktural dan politik, termasuk konflik berkepanjangan dengan Israel, blokade ekonomi di Gaza, serta lemahnya sistem distribusi nasional yang menghambat akses masyarakat terhadap pangan pokok. Keterbatasan sumber daya, dinamika politik antara Gaza dan Tepi Barat, serta ketergantungan pada lembaga internasional membuat pemerintah Palestina belum mampu mengelola kebijakan pangan secara mandiri. Meski ada upaya koordinasi dengan Kementerian Pembangunan Sosial (MoSD), sebagian besar program pangan dijalankan oleh lembaga kemanusiaan internasional seperti WFP, UNRWA, dan FAO (Sifana et al. 2024).

Hingga sekarang konflik tersebut masih terjadi dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keamanan pangan, masalah keamanan pangan menjadi salah satu sorotan penting pada konflik ini. Khususnya di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, kedua wilayah ini menghadapi tantangan serius dalam mencapai tingkat keamanan pangan yang memadai bagi penduduknya. Dampak dari konflik

yang berkelanjutan serta pembatasan pergerakan yang ketat dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan memberikan efek domino yang signifikan terhadap kemampuan masyarakat Palestina untuk memperoleh akses yang memadai terhadap sumber daya pangan, sektor perekonomian, dan infrastruktur yang sangat vital (Delgado and Tschunkert 2022).

Kerawanan pangan tahun 2018-2022 di Palestina merupakan lanjutan dari beberapa tahun terakhir. Kerawanan pangan ini diperparah oleh beberapa faktor seperti blokade yang dilakukan oleh Israel di Gaza sejak tahun 2007 yang memblokir jalur darat, laut, dan udara. Adanya blokade tersebut menyebabkan terbatasnya pergerakan pasokan bantuan pangan dan menyebabkan kelangkaan pangan serta naiknya harga pangan. Selain itu, permasalahan ekonomi terutama dalam angka pengangguran yang stabil tinggi juga memperburuk kondisi kerawanan pangan karena ketidakmampuan masyarakat Palestina untuk membeli bahan makanan pokok (World Bank 2023). Faktor lain dari terjadinya masalah pangan ini karena Palestina sendiri terlalu bergantung pada bantuan pangan internasional (Lin et al. 2022). Sementara pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi COVID-19 kondisi pangan di Palestina semakin buruk karena keadaan yang sudah rentan menjadi semakin kritis akibat pembatasan yang lebih ketat dan gangguan dalam rantai pasokan pangan.

Menurut laporan dari VOA Indonesia, hampir 600 ribu warga di Gaza mengalami kelaparan karena suplai makanan ke wilayah tersebut sangat terbatas (VOA Indonesia 2024). Sementara laporan dari *World Food Program* (WFP) menunjukkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, dua per tiga penduduk Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan internasional. Beberapa organisasi

internasional merespon adanya blokade bantuan ini seperti UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*) telah melanjutkan pemberian bantuan makanan di Gaza setelah sebelumnya dihentikan karena pembatasan terkait virus COVID-19. Namun, masih ada hampir 1 juta orang yang masih menunggu bantuan tersebut (VOA Indonesia 2020).

World Food Programme (WFP) merupakan lembaga kemanusiaan terbesar yang menangani kasus kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan. Organisasi ini didirikan pada tahun 1961 dan merupakan cabang bantuan pangan PBB. WFP bekerja sama dengan lebih dari 1.000 organisasi non-pemerintah (NGO) dari pemerintah, sektor swasta, individu, dan perorangan untuk menangani kerawanan pangan di negara-negara yang membutuhkannya. Organisasi ini menerima dana dari pemerintah, sektor swasta, dan individu, tetapi tidak menerima iuran atau porsi kontribusi yang dinilai oleh PBB. WFP merespon adanya kerawanan pangan di Palestina dengan melalui mandat gandanya dalam bidang kemanusiaan dan pembangunan. Bantuan kemanusiaan telah berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan merupakan elemen utama dalam respon internasional serta yang dipimpin oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Palestina dengan mendukung jaring pengaman sosial (WFP 2017). Di Palestina, WFP telah hadir sejak 1991 dan berperan melalui berbagai program bantuan pangan langsung serta transfer tunai berbasis kebutuhan lokal (WFP 2023).

Penelitian ini juga memperhatikan konteks keanggotaan WFP. Secara struktural World Food Programme (WFP) merupakan lembaga di bawah naungan PBB yang keanggotaannya terdiri dari negara-negara berdaulat yang memiliki hak

suara dalam Dewan Eksekutif (WFP 2022). Palestina sendiri sejak tahun 2012 berstatus sebagai *non-member observer state* di PBB atau belum diakui sepenuhnya sebagai negara berdaulat oleh seluruh anggota PBB sehingga tidak termasuk dalam daftar negara anggota penuh WFP (United Nations General Assembly, 2012). Meskipun demikian, WFP tetap aktif menyalurkan bantuan di Palestina berdasarkan mandat kemanusiaan yang menekankan pemberian bantuan tanpa diskriminasi terhadap populasi rentan di wilayah konflik. Hubungan antara WFP dan Palestina bersifat fungsional dan kemitraan operasional bukan administratif, dimana pelaksanaannya diatur melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan otoritas Palestina serta koordinasi dengan lembaga PBB lainnya seperti FAO dan UNRWA (WFP 2018). Kondisi ini menunjukkan fleksibilitas organisasi internasional dalam mengatasi batas-batas politik dan status kenegaraan, serta menegaskan bahwa legitimasi WFP di Palestina diperoleh melalui efektivitas pelaksanaan mandat kemanusiaan, bukan melalui keanggotaan formal.

Pada periode 2018–2022, WFP menerapkan *Country Strategic Plan* (CSP) yang menjadi kerangka utama operasionalnya di Palestina. Sejauh ini WFP telah mengirimkan dukungannya berupa bantuan pangan yang vital, melayani sekitar 350.000 warga Palestina setiap bulan, dan memperluas jangkauan bantuan kepada hampir satu juta warga Palestina melalui kerja sama dengan mitra kemanusiaan lainnya menggunakan *platform* transfer berbasis uang tunai (WFP 2023). Dengan mengacu terhadap latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait peran World Food Programme (WFP) dalam membantu mengatasi kerawanan pangan di Palestina.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor dan dampak dari adanya kerawanan pangan di Palestina pada tahun 2018-2022
2. Untuk menganalisis peran World Food Programme (WFP) selaku organisasi internasional yang berfokus pada bantuan pangan dalam upaya mengatasi kerawanan pangan di Palestina dalam rentang tahun 2018-2022.

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini akan berfokus pada peran World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina pada rentang tahun 2018-2022. Penelitian ini juga akan membahas terkait dampak konflik berkepanjangan yang terjadi antara Palestina dan Israel, masalah perekonomian dan dampak dari COVID-19 yang menimbulkan kerawanan pangan di Palestina. Dengan mempertimbangkan aspek sosial kemanusiaan, ekonomi, dan politik maka penulis memilih rentang waktu penelitian ini di tahun 2018-2022.

Alasan penulis memilih tahun 2018-2022 karena periode tersebut merupakan masa implementasi *Country Strategic Plan (CSP)* 2018–2022 yang

pertama yang digagas oleh WFP di Palestina. Sebelum itu, bantuan WFP masih berbentuk program operasional jangka pendek yang sifatnya tanggap darurat dan belum terencana secara strategis. Dengan demikian, penelitian ini menelusuri bagaimana pergeseran pendekatan WFP dari operasional jangka pendek menuju perencanaan jangka menengah mempengaruhi efektivitas penanganan kerawanan pangan di Palestina.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini terdapat beberapa tulisan dari peneliti lain yang relevan dengan judul yang penulis ambil. Dalam jurnal pertama “*Cash-Based Assistance in Conflict Settings: Evidence from the World Food Programme in the State of Palestine*” oleh Delgado dan Tschunkert 2022. Jurnal ini membahas efektivitas program bantuan berbasis tunai (*cash-based assistance*) yang diterapkan WFP di Palestina. Delgado dan Tschunkert menunjukkan bahwa skema bantuan tunai meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat ekonomi lokal, serta memberi otonomi lebih besar bagi penerima manfaat untuk memilih kebutuhan pangannya sendiri. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi WFP dengan lembaga lokal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas di tengah tantangan politik dan keamanan. Studi ini menjadi bukti empiris bahwa WFP tidak hanya berfungsi sebagai penyalur bantuan darurat, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan di Palestina. Dengan penelitian tersebut penulis mendapatkan informasi lebih lanjut terkait skema dan alokasi bantuan operasional WFP terutama dalam CBTnya.

Jurnal kedua berjudul “*The Impact of Assistance on Poverty and Food Security in A Fragile and Protracted-Crisis Context: The Case of West Bank and Gaza Strip*” yang ditulis oleh Donato Romanoa, Gianluca Stefania, Benedetto Rocchia, Ciro Fiorillo menyajikan analisis mendalam mengenai dampak bantuan kemanusiaan WFP terhadap kemiskinan dan ketahanan pangan di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Hal ini relevan dalam konteks krisis berkepanjangan yang melanda wilayah Palestina. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami komposisi paket makanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memastikan pola makan yang seimbang dan meningkatkan hasil program bantuan. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti kebutuhan dalam banyaknya data kualitatif yang dibutuhkan untuk menilai efektivitas berbagai bentuk dan sumber bantuan (Romanoa et al. 2019). Dalam penelitian ini mengacu pada laporan dan jurnal dari organisasi seperti Program Pembangunan PBB, *World Bank*, dan *World Food Programme*. Penelitian ini memberikan wawasan tentang evaluasi, ketahanan pangan, kemiskinan, dan pembangunan manusia dalam konteks krisis yang rapuh dan berkepanjangan. Dengan penelitian tersebut penulis dapat mengkorelasikan dengan judul "Peran WFP dalam Mengatasi Kerawanan Pangan di Palestina Tahun 2018-2022" karena memberikan analisis mendalam tentang dampak bantuan kemanusiaan terhadap kemiskinan dan ketahanan pangan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, khususnya dalam konteks krisis yang berkepanjangan yang dihadapi oleh wilayah Palestina.

Dalam jurnal ketiga yang berjudul “*Achieving Food Security Through Localisation, Not Aid: “De-development” and Food Sovereignty in The Palestinian Territories*” yang ditulis oleh Yara M. Asi memiliki pembahasan yang

berfokus utama mencakup dampak kebijakan Israel terhadap pertanian Palestina, peran dan keterbatasan bantuan internasional sebagai solusi jangka panjang, upaya untuk mencapai kemandirian pangan melalui produksi lokal, tantangan ekonomi yang dihadapi Palestina sebagai akibat dari pendudukan Israel, termasuk kemiskinan dan pembatasan akses ke sumber daya, dan ketergantungan Palestina pada bantuan eksternal karena kendali Israel atas sumber daya dan aktivitas ekonomi (Asi 2020, 11). Penelitian tersebut sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, seperti dalam jurnal tersebut membahas peran *World Food Program* (WFP) dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina, termasuk distribusi makanan siap saji, voucher makanan elektronik, makanan sekolah, dan dukungan kepada penjual lokal. Ketergantungan pada bantuan pangan diakibatkan oleh kombinasi konflik, perekonomian, dan kebijakan pembatasan pandemi yang membuat produksi pangan lokal menjadi mahal dan berisiko. Dengan begitu banyak data yang dapat dikaji oleh penulis dalam melakukan penelitiannya.

Sejauh ini belum banyak penelitian yang mengkaji terkait peran World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina. Dari literatur jurnal diatas dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian kedepannya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terletak pada fokus upaya World Food Programme (WFP) dalam memberikan bantuan pangan kepada kawasan yang sedang mengalami konflik berkepanjangan yaitu Palestina. Penelitian ini pada dasarnya akan mengkaji apakah World Food Programme (WFP) telah melaksanakan perannya sebagai organisasi internasional dalam masalah kerawanan pangan di Palestina.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menggunakan teori “*International Organizations*” oleh Clive Archer sebagai kerangka pemikiran untuk meneliti dan membahas terkait peran World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina pada rentang tahun 2018-2022. Menurut Clive Archer, organisasi internasional terlibat dalam pelaksanaan tugas dan mempengaruhi fungsi sistem internasional. Dalam sistem internasional, inputnya dapat berupa permintaan dari aktor-aktor internasional seperti kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan yang merupakan gabungan dari negara, kelompok, dan organisasi internasional (Archer 2001). Archer membagi fungsi ini menjadi sembilan bagian.

1. *Articulation and Aggregation*: Organisasi internasional menjadi alat bagi aktor untuk mengartikulasikan dan mengagregasi kepentingan berbagai aktor dalam urusan internasional (Archer 2001).
2. *Norms*: Organisasi internasional berperan dalam pembentukan norma dan nilai internasional. Ini melibatkan formalisasi nilai-nilai yang ada. Norma yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional, memberikan kerangka moral dan hukum yang penting untuk melegitimasi atau mendelegitimasi tindakan negara dan non-negara (Archer 2001).
3. *Recruitment*: Organisasi internasional berperan dalam merekrut anggota dan memberi dorongan untuk berpartisipasi aktif dalam sistem politik internasional (Archer 2001).
4. *Socialization*: Organisasi internasional berperan dalam sosialisasi negara dan aktor lain ke dalam perilaku yang diterima, nilai-nilai bersama, dan loyalitas terhadap sistem internasional. Proses ini membantu aktor belajar

untuk mempertimbangkan kebutuhan kolektif di samping kepentingan mereka sendiri (Archer 2001).

5. *Rule Making*: Organisasi internasional memiliki andil dalam perumusan aturan dan regulasi internasional, bertindak sebagai titik pusat untuk penciptaannya, dan memastikan anggota melaksanakan aturan tersebut (Archer 2001).
6. *Rule Application*: Organisasi internasional berperan dalam mengawasi dan memfasilitasi penerapan aturan internasional yang disepakati. Meskipun penegakan aktual seringkali berada di tangan negara-negara berdaulat, organisasi internasional menyediakan pemantauan, pengawasan, dan mekanisme untuk tindakan kolektif (Archer 2001).
7. *Rule Adjudication*: Organisasi internasional mampu untuk mengesahkan peraturan dalam sistem internasional. Serta, menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa yudisial antara klaim negara yang bersaing, berkontribusi pada interpretasi dan pengembangan hukum internasional (Archer 2001).
8. *Information*: Dalam organisasi internasional merujuk pada peran organisasi dalam menyediakan dan menyebarkan informasi yang relevan kepada negara-negara anggota dan publik (Archer 2001).
9. *Operation*: dalam organisasi internasional harus menjalankan sejumlah fungsi operasional. Fungsi tersebut dapat berupa penyedia bantuan, memberikan bantuan pengungsian, pengamat perdamaian PBB (Archer 2001).

Penelitian ini erat kaitannya dengan teori organisasi internasional oleh Clive Archer, pada penelitian ini penulis akan mengimplementasikan dan mengkaji masalah menggunakan teori 5 fungsi organisasi internasional (*Rule Making, Norms, Operation, Articulation and Aggregation, serta Information*) dari penulis Clive Archer karena teori ini dinilai tepat untuk melihat peran dari WFP dalam upaya mengatasi kerawanan pangan di Palestina.

Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai “*a formal, continuous structure established by agreement between members from two or more sovereign states with the aim of pursuing common interests*” (Archer 2001). Definisi ini menunjukkan bahwa organisasi internasional dibentuk atas dasar kesepakatan antar negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dalam sistem internasional. Namun, Archer juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya banyak organisasi internasional yang menjalankan peran melampaui batas keanggotaan formalnya. Hal ini menegaskan bahwa organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai forum bagi negara anggota tetapi juga sebagai instrumen pelaksana kebijakan dan mekanisme koordinasi global yang melibatkan aktor non-negara, wilayah administratif, dan populasi rentan (Archer 2001). Oleh karena itu, teori organisasi internasional tetap relevan untuk menganalisis aktivitas lembaga seperti WFP yang bekerja di wilayah non-member seperti Palestina. Meskipun Palestina bukan anggota penuh, WFP tetap menjalankan fungsi operasional bantuannya, artikulasi dan agregasi kepentingan, penyediaan informasi. Dengan demikian, teori Archer ini membantu menjelaskan bagaimana organisasi internasional dapat beroperasi secara efektif melampaui batas keanggotaan formal dengan menekankan aspek fungsi, struktur, dan mandatnya.

1.7 Argumen Sementara

Palestina menghadapi kerawanan pangan yang signifikan akibat berbagai faktor, termasuk faktor sosial kemanusiaan, konflik berkepanjangan, ketidakstabilan politik, pembatasan ekonomi, dan dampak COVID-19. WFP sebagai salah satu organisasi kemanusiaan terbesar di dunia, memainkan peran kunci dalam merespon situasi ini melalui berbagai program bantuan pangan. Implementasi penerapan teori fungsi organisasi internasional sangat memperlihatkan peran aktif dari WFP dalam dukungannya terhadap pangan Palestina. Fungsi *operation*, dalam hal ini World Food Programme (WFP) berperan dalam pengoperasian distribusi dan alokasi bantuan pangan di Palestina. WFP tidak hanya menetapkan nilai-nilai untuk bantuan pangan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan tersebut telah didistribusikan dengan baik. Fungsi *articulation and aggregation*, dalam hal ini World Food Programme (WFP) berperan dalam mengumpulkan dan menyuarakan kepentingan baik dari organisasi atau negara-negara donor dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanganan kerawanan pangan di Palestina. Fungsi *information*, dalam hal ini World Food Programme (WFP) berperan dalam mengumpulkan dan menyebarkan data serta informasi terkait kerawanan pangan di Palestina. WFP dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk memahami situasi pangan di wilayah tersebut, termasuk statistik tentang kelaparan, kebutuhan bantuan, dan efektivitas program yang dijalankan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena sangat relevan dengan proses penelitian ini yaitu pengumpulan data dari penelitian terdahulu dan laporan resmi yang didapat dari web World Food Programme (WFP) serta argumen relevan dengan topik peran World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina pada rentang tahun 2018-2022.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah peran World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina. Sementara untuk objek dari penelitian ini adalah kerawanan pangan di Palestina pada rentang tahun 2018-2022.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penelitian ini penulis menggunakan metode sekunder sebagai rujukan dalam proses pengumpulan data yang akan dikaji. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai literatur seperti penelitian terdahulu, jurnal, buku, berita dari media terpercaya, dan laporan langsung yang di unggah pada web resmi World Food Programme (WFP).

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini diawali dengan tahap pengumpulan data-data sekunder terkait dengan topik kerawanan pangan di Palestina dalam rentang tahun 2018-2022. Setelah tahap pengumpulan data kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan teori fungsi organisasi internasional oleh Clive Archer.

Setelah tahap tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu hasil dari penelitian ini apakah World Food Programme (WFP) berperan dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina dalam rentang tahun 2018-2022.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada Bab 1, berisi penjabaran secara singkat terkait kasus kerawanan pangan di Palestina dan peran WFP dalam memberikan dukungan terhadap Palestina yang berada dalam latar belakang. Kemudian penulis merumuskan masalah yang akan dianalisis lebih lanjut pada bab pembahasan. Penulis juga menentukan tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran yang berisi teori yang akan diimplementasikan dalam bab pembahasan, memberikan argumen sementara, serta menentukan metode penelitian.

Pada Bab II, akan membahas lebih rinci terkait permasalahan pangan di Palestina serta faktor dan dampak kerawanan pangan Palestina. Dilanjutkan dengan membahas masuknya World Food Programme (WFP) sebagai organisasi internasional yang memberikan bantuan pangan ke negara yang mengalami kerawanan pangan.

Pada Bab III, penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait peran World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina dalam rentang waktu 2018-2022 dengan mengimplementasikan teori fungsi organisasi internasional oleh Clive Archer. Bab ini mengkaji terkait peran WFP menggunakan pendekatan *operation, articulation and aggregation, information* sesuai teori yang telah ditentukan.

Pada Bab IV, berisi kesimpulan serta rekomendasi yang diharap berguna untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

KERAWANAN PANGAN DAN MUNCULNYA WORLD FOOD PROGRAMME DI PALESTINA

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di bab sebelumnya terkait kerawanan pangan di Palestina. Pada bab ini penulis akan menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampak dari kerawanan pangan di Palestina tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memahami berbagai aspek yang berkontribusi terhadap masalah pangan yang dihadapi. Dengan demikian, bab ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi pangan di Palestina.

2.1 Permasalahan Kerawanan Pangan di Palestina

Kerawanan pangan merupakan kondisi dimana adanya kelangkaan pangan signifikan yang mempengaruhi banyak orang di suatu wilayah, dan dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti konflik, masalah perekonomian dan tingkat pengangguran yang tinggi, serta COVID-19. Menurut FAO, kerawanan pangan dapat mengakibatkan malnutrisi dan kelaparan serta berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial (FAO 2024). Palestina secara geografis terletak di kawasan Asia Barat, saat ini sedang dilanda krisis kemanusiaan yang terus berlanjut dan berdampak pada runtuhnya ketahanan pangan di Palestina. Situasi pangan Palestina saat ini berada pada tingkat yang sangat rendah khususnya bagi penduduk yang berada di Jalur Gaza mereka menghadapi tantangan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kuantitas makanan bergizi yang cukup rendah tetapi berbanding dengan harga pangan terus meningkat secara signifikan. Situasi ini menyulitkan banyak

keluarga Palestina untuk memastikan bahwa makanan mereka layak dikonsumsi. Di sisi lain, Ketergantungan pada bantuan kemanusiaan semakin meningkat tetapi masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Kerawanan pangan yang terjadi di Palestina merupakan dampak langsung dari serangkaian tantangan yang kompleks termasuk konflik berkepanjangan, blokade, serta ketidakpastian ekonomi dan dampak dari COVID-19 yang terus memperburuk kondisi kehidupan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang terperangkap dalam kondisi kerawanan pangan akut serta dampak dari pandemi COVID-19 yang memperburuk sistem kesehatan, situasi ini membutuhkan perhatian global yang lebih besar. Upaya untuk mengatasi masalah ini tidak hanya memerlukan bantuan kemanusiaan yang lebih efektif, tetapi juga solusi jangka panjang yang mencakup perdamaian, stabilitas ekonomi, dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya vital untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Palestina (Ahmadi and Melgar-Quiñonez 2019). Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut penulis memberikan tabel jumlah populasi angka kerawanan pangan di Palestina dalam rentang tahun 2018-2022 berdasarkan laporan *Global Report Food Crises* oleh *Food Security Information Network* (FSIN).

Tabel 1. Jumlah Populasi Kerawanan Pangan Palestina 2018-2022

Tahun	Gaza (Jiwa)	Tepi Barat (Jiwa)	Total (Jiwa)
2018	1.358.000	329.981	1.687.981
2019	1.370.000	360.000	1.730.000

2020	1.400.000	600.000	2.000.000
2021	1.400.000	335.000	1.735.000
2022	1.190.000	350.000	1.540.000

Sumber: GRFC 2019, GRFC 2020, GRFC 2021, GRFC 2022, GRFC 2023, (FSIN 2020-2024)

Tabel ini menunjukkan perkembangan jumlah populasi yang mengalami kerawanan pangan di Palestina selama periode 2018–2022. Pada tahun 2018, sebanyak 1,69 juta jiwa mengalami kerawanan pangan sedang hingga parah, dengan proporsi tertinggi di Jalur Gaza sebesar 68% rumah tangga, sementara di Tepi Barat hanya sekitar 12% (FSIN 2019). Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan struktural antara kedua wilayah, di mana kondisi di Gaza memburuk akibat blokade dan konflik berkepanjangan, sedangkan Tepi Barat mengalami sedikit perbaikan. Pada tahun 2019, jumlah populasi rawan pangan mencapai 1,73 juta jiwa, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, menunjukkan stagnasi kondisi pangan meskipun ada upaya bantuan kemanusiaan (FSIN 2020).

Situasi memburuk tajam pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda, menyebabkan lonjakan populasi rawan pangan hingga 2 juta jiwa atau sekitar 38% dari total penduduk, terdiri atas 1,3 juta orang dengan ketidakamanan pangan parah dan 0,7 juta orang dengan ketidakamanan sedang (FSIN 2021). Kenaikan signifikan ini merupakan dampak kombinasi dari krisis ekonomi, konflik yang terus berlangsung, dan pembatasan akibat pandemi. Pada tahun 2021, jumlah penduduk rawan pangan menurun sedikit menjadi 1,73 juta jiwa, tetapi kondisi tetap stagnan dan jauh di atas tingkat pra-pandemi (FSIN 2022).

Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan total 1,54 juta jiwa, terdiri dari 1,19 juta jiwa di Gaza (53% populasi wilayah) dan 0,35 juta jiwa di Tepi Barat (11% populasi wilayah) (FSIN 2023). Penurunan ini mencerminkan adanya sedikit perbaikan berkat bantuan internasional dan peningkatan kapasitas distribusi pangan, namun angka tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Palestina, terutama di Gaza, tetap terjebak dalam kondisi kerawanan pangan kronis akibat blokade, konflik, dan keterbatasan ekonomi (FSIN 2020–2024).

2.2 Faktor Penyebab dan Dampak Kerawanan Pangan Palestina

Kerawanan pangan di Palestina dalam periode tahun 2018-2022 dipengaruhi oleh faktor politik Palestina, konflik dengan Israel, masalah perekonomian, dan adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 memperburuk situasi dengan mempengaruhi ekonomi, akses layanan kesehatan dan pangan. Maka dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan terkait faktor dan dampak dalam permasalahan pangan di palestina dalam rentan tahun 2018-2022.

Faktor politik menjadi fondasi dari seluruh dinamika ketahanan pangan di Palestina. Sejak pendudukan Israel pada tahun 1967, Palestina tidak memiliki kedaulatan penuh atas wilayah dan sumber daya alamnya, termasuk tanah, air, dan perbatasan ekonomi. Ketiadaan kendali politik ini berimplikasi langsung pada ketahanan pangan karena pemerintah Palestina tidak memiliki otoritas untuk mengatur impor pangan, tarif perdagangan, dan kebijakan pertanian nasional secara independen (World Bank 2023). Selain itu, ketidakstabilan politik internal

antara Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat dan kelompok Hamas di Jalur Gaza sejak tahun 2007 memperburuk kondisi tata kelola. Persaingan politik antara kedua entitas ini telah menciptakan dualisme administratif yang menghambat koordinasi dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dan implementasi kebijakan pangan nasional (OCHA 2021). Banyak program bantuan yang tertunda karena perbedaan kebijakan antara Gaza dan Tepi Barat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi bahan pangan. Keterbatasan politik ini juga membuat Palestina sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Dana pembangunan dan bantuan pangan dari organisasi internasional seperti WFP, FAO, dan UNRWA menjadi tulang punggung keberlangsungan hidup jutaan penduduk. Namun, bantuan tersebut seringkali dipolitisasi dan tidak berkelanjutan karena bergantung pada kondisi geopolitik dan perubahan kebijakan donor internasional (Delgado and Tschunkert 2022).

Konflik berkepanjangan dan blokade yang dilakukan oleh Israel merupakan faktor paling nyata yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Palestina secara langsung. Situasi keamanan yang tidak stabil telah menyebabkan kehancuran infrastruktur dasar, penurunan produktivitas ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya alam yang penting untuk produksi pangan. Blokade di Gaza membatasi hampir semua bentuk pergerakan barang dan manusia, termasuk pasokan pangan, air, bahan bakar, serta bantuan kemanusiaan. Akibatnya, ribuan keluarga bergantung sepenuhnya pada bantuan dari lembaga internasional untuk memenuhi kebutuhan harian mereka (OCHA 2021). Demonstrasi Great March of Return pada Maret 2018 menjadi puncak perlawanan rakyat terhadap blokade tersebut, menuntut hak kembali bagi para pengungsi dan

diakhirinya pengepungan, namun represi militer Israel mengakibatkan ratusan korban jiwa (Amnesty International 2018). Di Tepi Barat, kebijakan pembangunan permukiman ilegal oleh Israel telah mempersempit ruang hidup masyarakat Palestina. Laporan OCHA (2018) mencatat bahwa pada tahun 2019 sebanyak 815 warga Palestina diusir dari rumah mereka, meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kekerasan dari pemukim Israel serta pembatasan akses terhadap lahan pertanian dan penggembalaan menyebabkan ribuan keluarga kehilangan sumber penghidupan. Selain itu, sekitar 3.000 petani Palestina tidak dapat mengakses tanah yang berada di dekat pagar pembatas Israel, dan lebih dari 4.000 keluarga nelayan menghadapi pembatasan ketat terhadap akses laut (OCHA 2021). Konflik besar pada Mei 2021, yang dikenal sebagai Perang Gaza 2021, menambah penderitaan rakyat Palestina. Serangan udara intensif yang dilakukan oleh Israel menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerusakan luas terhadap rumah, sekolah, dan fasilitas publik (Prawira, Irawan, and Karen 2021). FSIN (2023) mencatat bahwa akibat konflik ini, lebih dari 27% lahan pertanian di Gaza rusak, memperburuk ketergantungan masyarakat pada bantuan pangan. Eskalasi kekerasan yang berulang setiap tahun juga mengakibatkan trauma psikologis dan menghambat produktivitas generasi muda.

Faktor lainnya adalah perekonomian Palestina berada dalam kondisi stagnan selama lebih dari satu dekade akibat pembatasan struktural dan konflik berkepanjangan. Ketergantungan tinggi terhadap impor, rendahnya investasi, serta terbatasnya akses pasar menjadi faktor utama yang melemahkan stabilitas ekonomi nasional. Pada tahun 2019, perekonomian Gaza hanya tumbuh sebesar 1,8% setelah mengalami resesi hampir 7% pada tahun sebelumnya, sedangkan di

Tepi Barat pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 1,2% (World Bank 2019). Rendahnya pertumbuhan ini disertai tingginya angka pengangguran, di mana tingkat pengangguran di Gaza mencapai lebih dari 45%, sementara di Tepi Barat berkisar antara 17–19% (FSIN 2022). Kondisi tersebut menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis dan mendorong rumah tangga bergantung pada utang untuk bertahan hidup; WFP (2019) mencatat lebih dari 80% rumah tangga di Gaza memiliki utang antara USD 1.810 hingga USD 3.498 untuk membeli kebutuhan dasar seperti makanan dan listrik. Situasi ekonomi yang rapuh semakin memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 di mana pembatasan aktivitas ekonomi menyebabkan sekitar 121.000 warga kehilangan pekerjaan di Gaza dan pendapatan rata-rata menurun hampir 90% (World Bank 2020). Meskipun pada 2021 ekonomi Palestina menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan 5,4% di Tepi Barat akibat pelanggaran lockdown, kondisi di Gaza tetap stagnan akibat kerusakan infrastruktur dan berlanjutnya blokade (FSIN 2022). Permasalahan ekonomi juga berdampak pada meningkatnya utang rumah tangga, dengan sekitar 79% rumah tangga di Gaza dan 37% di Tepi Barat memiliki utang untuk memenuhi kebutuhan dasar (Anabtawi et al. 2025). Keterbatasan pendapatan membuat banyak keluarga terpaksa mengurangi konsumsi pangan bergizi, menarik anak dari sekolah, dan menjual aset produktif, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan yang berujung pada meningkatnya ketergantungan terhadap bantuan pangan internasional.

Faktor terakhir adalah pandemi COVID-19 yang menjadi guncangan besar bagi Palestina dengan berdampak pada buruknya kondisi sosial ekonomi dan ketahanan pangan di Palestina. Sistem kesehatan yang rapuh, kekurangan

obat-obatan hingga 43% serta terbatasnya fasilitas medis menyebabkan pelayanan publik lumpuh selama masa pandemi (HNO 2020). Kasus pertama COVID-19 teridentifikasi di Betlehem pada Maret 2020 dan hingga tahun 2022 jumlah kasus kumulatif mencapai lebih dari 654.000 dengan 5.622 kematian (FSIN 2023). Pandemi juga memperburuk akses masyarakat terhadap pangan karena pembatasan mobilitas, gangguan rantai pasokan, serta meningkatnya harga bahan pokok yang menyebabkan banyak keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan bergizi. WFP dan UNICEF (2020) melaporkan bahwa lebih dari 210.000 anak dan 80.000 perempuan di Gaza menghadapi resiko kekurangan gizi, sementara 28% perempuan menyusui mengalami defisiensi zat besi, yang berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan produktivitas generasi mendatang. Selain itu, pandemi memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan kemanusiaan, dengan sekitar 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan pangan selama 2020–2022 (FSIN 2023). Upaya vaksinasi pun terkendala oleh keterbatasan pasokan dan distribusi yang tidak merata; hingga Maret 2022 hanya sekitar 58% populasi yang menerima setidaknya satu dosis vaksin (FSIN 2023). Dengan demikian, pandemi COVID-19 memperlihatkan betapa rapuhnya sistem sosial, ekonomi, dan kesehatan Palestina dalam menghadapi krisis global yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

2.3 Masuknya World Food Programme di Palestina

World Food Programme mulai beroperasi di *Occupied Palestinian Territory* (OPT) sejak tahun 1991, melalui proyek bantuan pangan berskala kecil yang ditujukan bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan di Gaza Strip serta Tepi Barat. Program awal ini fokus pada bantuan darurat dan distribusi tepung

gandum, minyak, serta kacang-kacangan kepada masyarakat terdampak konflik. Kehadiran WFP pada periode ini menjadi bagian dari upaya awal komunitas internasional untuk merespon dampak sosial-ekonomi akibat pendudukan militer yang berkepanjangan (Humanitarian Practice Network 2004). Setelah terbentuknya *Palestinian Authority* (PA) melalui *Oslo Accord* tahun 1993, WFP mendirikan *Country Office* OPT pada 1995 guna memperkuat koordinasi bantuan pangan dengan otoritas nasional dan memastikan bahwa mekanisme distribusi selaras dengan prioritas pembangunan sosial Palestina (Humanitarian Practice Network 2004). Langkah ini menandai perubahan penting dari bantuan berbasis darurat menuju pendekatan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi dengan lembaga pemerintahan lokal.

Pada 1996 WFP meluncurkan operasi darurat pertama di Gaza sebagai respon terhadap kebijakan *closure measures* oleh Pemerintah Israel yang membatasi pergerakan barang dan pekerja antara Gaza, Tepi Barat, dan Israel. Kebijakan ini menimbulkan gangguan besar terhadap rantai pasok pangan dan memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga. WFP merespon dengan meningkatkan kapasitas operasionalnya dan memperluas jaringan kemitraan dengan *Ministry of Social Development* (MoSD) dan *Ministry of Agriculture* (MoA) untuk memastikan distribusi bantuan menjangkau kelompok paling rentan (WFP 2023).

Kerjasama antara WFP dan pemerintah Palestina disahkan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) pada Desember 1997, yang menetapkan pembagian peran jelas dalam pelaksanaan bantuan sosial, pengumpulan data, serta

pengawasan logistik bantuan pangan (Humanitarian Practice Network 2004). MoU ini juga menjadi dasar hukum bagi WFP untuk beroperasi secara resmi di wilayah Palestina dan memperkuat koordinasi antar lembaga nasional. Seiring berjalannya waktu, fokus WFP di Palestina mengalami evolusi dari respon kemanusiaan jangka pendek menuju pembangunan kapasitas jangka panjang. Hal ini tercermin dalam peluncuran Country Strategic Plan (CSP) 2018–2022 yang mencakup peningkatan akses pangan, penguatan kapasitas nasional, dan penyediaan data kebijakan (WFP 2023)

World Food Programme merupakan organisasi internasional yang berfokus pada penanganan kelaparan dan kerawanan pangan. Didirikan pada tahun 1961 di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, WFP memiliki misi untuk memberikan bantuan makanan kepada mereka yang membutuhkan di seluruh dunia. Tujuan utama WFP adalah menyediakan bantuan makanan di daerah yang mengalami kerawanan pangan, membangun ketahanan pangan, dan mendukung masyarakat dalam mengatasi masalah kelaparan. Fungsi utama WFP meliputi bantuan darurat kepada populasi yang terkena bencana alam atau konflik, program pembangunan untuk meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang, serta kampanye kesadaran global tentang masalah kelaparan (WFP 2023).

Prinsip utama WFP yang berguna untuk membimbing semua kegiatan dan programnya yaitu kemanusiaan, imparialitas, netralitas, independensi, keberlanjutan, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip kemanusiaan menekankan komitmen WFP untuk memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan tanpa memandang latar belakang, sedangkan imparialitas

memastikan bahwa bantuan diberikan secara adil kepada semua yang terkena dampak. Netralitas dan independensi WFP menjaga agar organisasi ini tidak berpihak dalam konflik dan tetap otonom dalam pengambilan keputusan. Selain itu, WFP berfokus pada keberlanjutan dengan mencari solusi jangka panjang untuk masalah kelaparan, mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan program, dan berkomitmen pada transparansi serta akuntabilitas dalam semua operasinya. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi semua kegiatan WFP dan memastikan bahwa organisasi ini dapat memberikan bantuan yang efektif dan tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan di seluruh dunia (WFP 2023).

2.4 Country Strategic Plan (CSP) WFP di Palestina 2018–2022

Sebelum diterapkannya *Country Strategic Plan (CSP)* pada tahun 2018, kegiatan World Food Programme (WFP) di Palestina dijalankan melalui proyek-proyek jangka pendek seperti *Emergency Operations (EMOP)* dan *Protracted Relief and Recovery Operations (PRRO)*. Kedua mekanisme tersebut bersifat reaktif dan berfokus pada penyaluran bantuan pangan darurat bagi masyarakat terdampak konflik dan blokade di Gaza serta Tepi Barat. Program PRRO terakhir WFP di Palestina berakhir pada tahun 2017 yang berfokus pada pemulihan awal pasca konflik dan bantuan pangan untuk 800.000 jiwa di Gaza (WFP 2017). Setelah lebih dari satu dekade menggunakan skema darurat semacam ini, WFP menilai bahwa pendekatan tersebut belum cukup untuk menjawab akar masalah ketahanan pangan yang bersifat struktural seperti pengangguran tinggi, ketergantungan impor, dan pembatasan mobilitas yang menghambat distribusi pangan.

Oleh karena itu, sejak 2016 WFP bersama pemerintah donor dan *United Nations Country Team* (UNCT) memulai reformasi sistem perencanaan melalui pendekatan jangka menengah yang disebut *Country Strategic Plan* (CSP). Pendekatan ini bertujuan untuk menyatukan seluruh kegiatan WFP di setiap negara ke dalam satu kerangka strategis yang lebih integratif, sejalan dengan agenda plan tahun 2030 yaitu *Agenda for Sustainable Development* dan *Zero Hunger Strategy*. Palestina menjadi salah satu negara prioritas penerapan CSP generasi pertama karena tingginya tingkat kerawanan pangan dan perlunya sinergi antara bantuan darurat dan pembangunan jangka panjang (WFP 2018). Dengan demikian, CSP 2018-2022 merupakan rencana strategis pertama yang disusun khusus untuk Palestina, menandai pergeseran besar dari operasi bantuan jangka pendek menuju pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun Palestina belum diakui secara penuh sebagai negara anggota World Food Programme (WFP) karena statusnya sebagai *non-member observer state* di PBB (United Nations General Assembly 2012), WFP tetap memperoleh mandat operasional untuk menyalurkan bantuan berdasarkan prinsip kemanusiaan. Pelaksanaan *Country Strategic Plan* (CSP) diatur melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara WFP dan Otoritas Palestina pada tahun 2018 yang menetapkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah lokal, mitra pelaksana, dan lembaga donor internasional (WFP 2018). Dalam implementasinya, WFP mengoperasikan tiga mekanisme utama yang saling terintegrasi yaitu penyaluran bantuan pangan langsung melalui distribusi komoditas pokok seperti tepung, minyak, garam melalui jaringan toko mitra lokal dan pemberian bantuan berbasis tunai (*Cash Based Transfer*) dalam bentuk uang tunai dan *e-voucher* yang dapat

digunakan di toko pangan terdaftar untuk memberikan kebebasan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis pangan, serta peningkatan kapasitas dan koordinasi melalui dukungan teknis bagi lembaga pemerintah dalam memperkuat sistem informasi dan tata kelola pangan nasional. Pendekatan terpadu ini menunjukkan bahwa meskipun Palestina bukan anggota penuh, wilayah tersebut tetap menjadi prioritas operasional WFP karena urgensi kemanusiaan dan kebutuhan akan stabilitas sosial. Dalam perspektif Clive Archer, fungsi organisasi internasional tidak terbatas pada negara anggota, melainkan dapat diperluas untuk melaksanakan mandatnya yang mencakup pengoperasionalan bantuan, artikulasi kepentingan masyarakat, dan penyediaan informasi.

2.4.1 Tujuan dan Penerapan CSP di Palestina 2018-2022

CSP WFP di Palestina 2018-2022 merupakan program kerja strategis yang menjadi dasar dari seluruh program bantuan kemanusiaan, pembangunan kapasitas, dan dukungan sistem pangan ke dalam satu kerangka kerja yang menyeluruh. Program ini dirancang agar sejalan dengan *United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)* terutama tujuan 2 (*Zero Hunger*), tujuan 5 (*Gender Equality*), dan tujuan 17 (*Partnerships for the Goals*) (WFP 2018). Melalui CSP ini WFP berupaya memperkuat kestabilan antara bantuan jangka pendek yang bersifat darurat dengan pembangunan ketahanan pangan jangka menengah di wilayah yang terdampak konflik dan blokade. Pendekatan ini menekankan tiga prinsip utama, yaitu transisi dari bantuan darurat menuju pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas pemerintah dan lembaga lokal, serta pemanfaatan data dan teknologi untuk

mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan efektivitas operasional di lapangan.

Secara struktural CSP Palestina 2018–2022 menetapkan tiga *Strategic Outcome* yang menjadi kerangka kerja operasional WFP dalam melaksanakan mandat kemanusiaannya di Palestina. *Strategic Outcome 1 “ non-refugees, poor and severely food insecure people in Palestine (primarily in Gaza and Area C in the West Bank) have improved dietary diversity by 2022”*. SO 1 ini berfokus pada peningkatan keberagaman pangan (*dietary diversity*) bagi masyarakat non-pengungsi, miskin, dan rawan pangan di Palestina khususnya di Jalur Gaza dan Area C di Tepi Barat. Tujuan ini dirumuskan agar pada tahun 2022 kelompok tersebut mampu mengakses dan mengkonsumsi pangan yang lebih bergizi dan beragam dibandingkan sebelumnya (WFP 2018). Dalam pelaksanaannya, WFP menyalurkan bantuan melalui dua mekanisme utama, yaitu distribusi pangan langsung dan program *Cash Based Transfer* (CBT) berupa bantuan tunai serta *e-voucher* digital yang memungkinkan penerima manfaat membeli bahan pangan sesuai preferensi mereka di toko mitra lokal. Pendekatan CBT ini tidak hanya memberikan keleluasaan kepada penerima dalam menentukan jenis pangan yang dikonsumsi, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dengan melibatkan lebih dari 300 toko mitra lokal di Gaza dan Tepi Barat (Delgado and Tschunkert 2022). Evaluasi WFP menunjukkan bahwa penerima CBT mengalami peningkatan dalam keberagaman jenis pangan dalam rumah tangga sebesar 18%, terutama di wilayah dengan keterbatasan distribusi bantuan langsung (WFP 2023). Dengan demikian menunjukkan WFP menjalankan kebijakan global di tingkat lokal untuk memenuhi mandat kemanusiaannya dalam konteks non-member.

Strategic Outcome 2 “Enhanced capacities of national institutions and systems to identify, target and assist food insecure vulnerable populations in Palestine by 2022”. SO 2 ini bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga nasional dan sistem pemerintahan dalam mengidentifikasi, menargetkan, dan memberikan bantuan kepada populasi rentan dan rawan pangan di Palestina hingga tahun 2022. Tujuan ini berangkat dari kesadaran bahwa ketahanan pangan tidak dapat dicapai hanya melalui bantuan langsung, tetapi memerlukan tata kelola yang efektif dan sistem nasional yang inklusif (WFP 2018). Dalam konteks ini, WFP berperan sebagai mitra pembangunan yang membantu pemerintah Palestina memperkuat kapasitas kelembagaan dan infrastruktur data ketahanan pangan. Program ini diwujudkan melalui pengembangan *Vulnerability Analysis and Mapping (VAM)*, sistem analisis spasial untuk memantau tingkat kerentanan pangan secara berkala, serta kolaborasi dengan *National Social Safety Net Programme (NSSNP)* yang dikelola oleh *Ministry of Social Development (MoSD)* (WFP 2023). Melalui inisiatif ini, pemerintah Palestina dapat mengakses data yang lebih akurat dalam menargetkan bantuan kepada kelompok paling rentan. SO 2 menunjukkan fungsi artikulasi agregasi organisasi internasional sebagaimana dikemukakan Clive Archer (Archer 2001) di mana WFP berperan sebagai penghubung antara pengetahuan global, teknologi, dan kebijakan lokal yang mendukung pembangunan sosial.

Selanjutnya, *Strategic Outcome 3 “Palestinians benefit from the services provided to partners through WFP’s delivery platform”.* SO 3 ini menegaskan peran WFP sebagai penyedia layanan logistik dan platform kemanusiaan bagi para

mitra kerja di Palestina. Tujuan utama SO 3 adalah memastikan bahwa lembaga-lembaga mitra termasuk badan PBB, lembaga donor, dan organisasi non-pemerintah dapat memperoleh manfaat dari layanan dan sistem logistik WFP yang efisien dan terkoordinasi (WFP 2018). Melalui strategis ini WFP tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana bantuan langsung tetapi juga sebagai penyedia *delivery platform* yang dapat digunakan untuk mendukung operasi kemanusiaan lintas lembaga. WFP menyediakan layanan transportasi, penyimpanan, dan distribusi pangan, serta sistem pembayaran digital (CBT) yang digunakan bersama oleh mitra seperti FAO, UNRWA, dan UNICEF. Dalam konteks ini, efektivitas WFP tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat langsung, tetapi juga dari sejauh mana kapasitas logistiknya memperkuat efektivitas lembaga kemanusiaan lain di Palestina (WFP 2023). SO 3 mencerminkan fungsi artikulasi dan agregasi sebagaimana dijelaskan Archer.

Ketiga *Strategic Outcome* tersebut saling melengkapi dalam membentuk sistem kerja yang berlapis. SO 1 berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar pangan masyarakat rentan, SO 2 memperkuat kapasitas nasional dan sistem perlindungan sosial agar mampu menangani krisis pangan secara mandiri dan SO 3 memperluas peran WFP sebagai penyedia layanan kemanusiaan bagi mitra lain di wilayah konflik. Keseluruhan kerangka ini menunjukkan bahwa CSP Palestina 2018-2022 merupakan model operasional yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian bukan sekedar bantuan jangka pendek. Pendekatan tersebut menggambarkan model *triple nexus* yang menghubungkan bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan ketahanan (*humanitarian, development, resilience nexus*). Melalui CSP ini, WFP berhasil menunjukkan efektivitas peran organisasi

internasional di wilayah non-member state dengan menjalankan mandat kemanusiaan universal tanpa harus bergantung pada keanggotaan formal (Delgado and Tschunkert 2022).

BAB 3

**ANALISIS PERAN WORLD FOOD PROGRAMME DALAM
MENGATASI KERAWANAN PANGAN DI PALESTINA MENURUT
TEORI ORGANISASI INTERNASIONAL OLEH CLIVE ARCHER**

Pada bab 3 ini, penulis akan membahas dan menganalisis peran World Food Programme dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina. Kerawanan pangan ini merupakan masalah yang kompleks dan berakar pada akar-akar yang mendalam, WFP sebagai organisasi internasional yang berfokus pada bantuan pangan mengambil peran dalam membantu dan mendukung ketahanan pangan di Palestina. Agar pembahasan semakin jelas, penulis akan menerapkan teori yang ditulis dalam buku Clive Archer yang berjudul “International Organization”. Dalam buku ini, Archer membahas berbagai fungsi organisasi internasional. Dalam pembahasan ini penulis akan mengambil tiga poin yang akan membantu menganalisis peran WFP dalam menghadapi kerawanan pangan di Palestina, diantaranya yaitu *operations, articulation and aggregation, dan information*.

3.1 Fungsi *International Organizations* Clive Archer dalam Analisis Peran WFP di Palestina

Pada sub bab ini memiliki tujuan untuk menguraikan rasionalisasi di balik pemilihan tiga fungsi dari teori *International Organizations* oleh Clive Archer yaitu fungsi *Rule Making, Norms, Operation, Articulation and Aggregation*, serta *Information* sebagai kerangka analisis utama dalam meneliti peran World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina antara tahun 2018-2022. Pemilihan ini didasarkan pada keselarasan antara sifat dan mandat WFP dengan karakteristik fungsi-fungsi tersebut. Sebaliknya, empat fungsi

Archer lainnya yaitu *Recruitment*, *Socialization*, *Rule Application*, dan *Rule Adjudication* dianggap kurang relevan atau tidak selaras dengan fokus empiris dan cakupan penelitian pada skripsi ini.

Fungsi *Recruitment* berkaitan dengan perekrutan anggota dan mendorong partisipasi dalam sistem politik internasional (Archer 2001). WFP bukanlah organisasi yang merekrut negara sebagai anggota, namun WFP merupakan entitas di bawah payung PBB. Meskipun WFP membangun kemitraan untuk tujuan operasionalnya, ini merupakan bentuk agregasi kepentingan aktor yang sudah ada bukan "perekrutan" aktor baru ke dalam sistem internasional. Fungsi *Socialization* berfokus pada peran organisasi internasional dalam mensosialisasikan negara dan aktor lain ke dalam perilaku yang diterima dan nilai-nilai bersama (Archer 2001). Meskipun kegiatan WFP dalam pembangunan kapasitas institusi nasional Palestina dapat berkontribusi pada praktik terbaik ketahanan pangan, namun ini bukan tujuan utama atau eksplisitnya. Fokus WFP adalah respon terhadap masalah kerawanan dan pembangunan ketahanan pangan, bukan perubahan perilaku atau loyalitas sistemik jangka panjang. Lingkungan konflik di Palestina juga membatasi ruang lingkup sosialisasi sistemik oleh WFP.

Fungsi *Rule Application* mengacu pada pengawasan dan fasilitasi penerapan aturan internasional yang disepakati dengan penegakan seringkali di tangan negara (Archer 2001). WFP tidak memiliki mekanisme penegakan hukum atau kapasitas untuk memaksa negara mematuhi aturan internasional. Perannya adalah mematuhi prinsip kemanusiaan dalam operasinya sendiri bukan menegakkan kepatuhan negara lain. Fungsi *Rule Adjudication* adalah kemampuan organisasi internasional untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa

yudisial antarnegara (Archer 2001). WFP bukanlah badan yudisial dan tidak memiliki fungsi untuk mengadili sengketa hukum antarnegara atau menafsirkan hukum internasional dalam konteks litigasi.

Pengecualian empat fungsi teori Clive Archer ini penting untuk menjaga fokus dan relevansi analisis skripsi. Fungsi-fungsi yang tidak dipilih ini cenderung menggambarkan peran organisasi internasional dalam mengelola keanggotaan dan perilaku aktor negara pada tingkat sistemik yang lebih luas. Sebaliknya, lima fungsi yang dipilih yaitu *Rule Making, Norms, Operation, Articulation and Aggregation*, serta *Information* secara tepat mencerminkan peran utama WFP sebagai aktor kemanusiaan yang berorientasi pada tindakan langsung, fasilitasi kerja sama, dan penyediaan data di lapangan untuk mengatasi kerawanan pangan di Palestina. Pendekatan ini memastikan analisis skripsi tetap selaras dan akurat merefleksikan peran spesifik dari WFP.

3.2 Penerapan Fungsi *Rule Making* WFP di Palestina

Salah satu fungsi utama organisasi internasional adalah fungsi pembentukan aturan, fungsi *rule making* ini menyediakan fokus bagi pembuatan aturan terlepas dari proses teknis yang digunakan oleh organisasi. Beberapa organisasi hampir sepenuhnya didedikasikan untuk pembuatan aturan (Archer 2001). Dalam penerapan fungsi *rule making*, World Food Programme (WFP) ini terwujud dalam dokumen *General Regulations and Rules of the World Food Programme* yang menjadi kerangka hukum dasar bagi seluruh kegiatan WFP di tingkat global. Dokumen ini ditetapkan oleh Dewan Eksekutif WFP (*Executive Board*) dan memiliki kekuatan hukum internal yang mengatur mandat, ruang lingkup, dan tata cara operasional lembaga. Dokumen ini menjadi landasan

konstitusional bagi WFP dan memiliki status sebagai aturan hukum publik internasional yang mengatur tata kelola bantuan pangan global. Dua pasal penting yang menunjukkan fungsi *rule making* WFP adalah *Article IX* yang menjelaskan siapa yang berhak menerima bantuan dan bagaimana mekanisme permintaan bantuan dilakukan.

“All States Members of the United Nations or Members or Associate Members of any specialized agency or of the IAEA shall be eligible to submit requests for consideration by WFP. WFP may also provide emergency food aid and associated non-food items and logistics support at the request of the Secretary General” (WFP 2025,14)

Pasal IX ini merupakan landasan utama yang memberi WFP kewenangan hukum untuk menyalurkan bantuan ke entitas non anggota PBB termasuk Palestina. Berdasarkan pasal tersebut WFP dapat memberikan bantuan apabila terdapat permintaan resmi dari Sekretaris Jenderal PBB yang menjadi representasi legitimasi politik dan hukum dalam sistem PBB. Ketentuan ini menjelaskan mengapa WFP dapat melaksanakan operasi kemanusiaan di Palestina meskipun wilayah tersebut berstatus *non member observer state* (WFP 2025). Melalui ketentuan ini bantuan kemanusiaan di Palestina memiliki dasar legal internasional bukan sekadar kebijakan teknis atau inisiatif donor.

Fungsi *rule making* tidak hanya pada pembentukan aturan dasar tetapi juga menjadi gagasan utama bagi lahirnya program kerja *Country Strategic Plan* (CSP). Dalam kerangka hukum WFP CSP berfungsi sebagai dokumen strategis jangka menengah yang mengimplementasikan mandat kemanusiaan lembaga di tingkat negara. Namun secara hukum CSP tidak memiliki kekuatan hukum.

Dengan adanya dokumen tersebut CSP memperoleh legitimasi dari *General Regulations* khususnya pada pasal IX yang mengatur kelayakan penerima bantuan serta mekanisme persetujuan dari *Executive Board*. Dengan demikian, pasal IX berperan sebagai “aturan konstitusional” yang memayungi semua bentuk strategi dan program WFP di Palestina. Melalui pasal ini CSP memperoleh legitimasi hukum internasional sekaligus memastikan bahwa bantuan yang disalurkan berupa pangan, tunai, maupun dukungan logistik selaras dengan prinsip kemanusiaan PBB. Dalam praktiknya, CSP 2018-2022 di Palestina berhasil menjangkau lebih dari 400.000 penerima manfaat, dengan fokus pada peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan (WFP 2023). Hal ini memperlihatkan bagaimana aturan yang dibentuk melalui fungsi *rule making* ditransformasikan menjadi kerangka kerja operasional yang nyata.

3.3 Penerapan Fungsi Norma WFP di Palestina

Fungsi norma organisasi internasional terletak pada pembentukan dan penyebaran standar perilaku bersama di berbagai bidang terutama ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia yang menjadi landasan moral dan hukum dalam sistem internasional (Archer 2001). Dengan demikian organisasi internasional tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan tetapi juga sebagai pembawa nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kesetaraan.

World Food Programme (WFP) menjalankan fungsi norma ini melalui penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan hak atas pangan sebagai nilai dasar yang membentuk interaksi antara lembaga internasional, pemerintah lokal, serta masyarakat penerima bantuan. Meskipun WFP bukan lembaga politik atau badan pembuat hukum aktivitasnya di Palestina berperan

penting dalam menanamkan norma global mengenai hak atas pangan sebagai hak asasi manusia (UNGA 2011). Melalui berbagai program bantuan dan kebijakan operasional WFP berkontribusi terhadap pembentukan dan penyebaran norma-norma kemanusiaan.

Pertama, WFP mempromosikan norma kemanusiaan dan netralitas dalam operasi bantuan pangan di wilayah konflik. Dengan bekerja di bawah mandat kemanusiaan WFP memastikan bahwa bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan tanpa diskriminasi politik, etnis, atau agama. Prinsip ini ditegaskan dalam laporan resmi lembaga bahwa *“food assistance in Palestine is provided solely on the basis of assessed need, independent of political, religious, or social affiliation”* (WFP 2022). Sikap netral tersebut memperkuat penerimaan norma bahwa bantuan kemanusiaan adalah hak kemanusiaan bukan instrumen politik, dan menjadi acuan bagi berbagai organisasi lokal serta mitra internasional di Palestina dalam menyalurkan bantuan.

Kedua, WFP berperan dalam nilai kerja sama dengan aktor untuk ketahanan pangan. Melalui *Country Strategic Plan (CSP) 2018–2022* WFP membangun mekanisme kolaborasi dengan *Ministry of Social Development (MOSD)*, *Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS)*, serta lembaga donor internasional seperti Uni Eropa dan USA (WFP 2022). Kolaborasi ini menanamkan norma baru dalam tata kelola bantuan bahwa penanganan kerawanan pangan harus berbasis kemitraan dan bukti nyata bukan semata bantuan belas kasih.

Ketiga, WFP turut memperkuat norma kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat rentan melalui program *Cash Based Transfers (CBT)*.

Program tersebut tidak hanya bertujuan menyediakan pangan tetapi juga menanamkan nilai bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya rumah tangga dan ekonomi lokal (WFP 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan implementasi WFP berorientasi pada nilai kesetaraan dan pemberdayaan sosial sejalan dengan norma global gender equality sebagaimana diamanatkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* / SDG 5).

Keempat, melalui publikasi data kerawanan pangan, laporan *Vulnerability Analysis and Mapping* (VAM), WFP juga menerapkan norma transparansi dan akuntabilitas informasi. Sistem VAM dan *mobile* VAM (mVAM) menciptakan standar internasional mengenai bagaimana isu pangan harus ditangani secara berbasis bukti. Melalui praktik ini, WFP memperkenalkan bentuk norma pengetahuan baru di Palestina, dimana kebijakan sosial harus berpijak pada data dan transparansi, bukan pertimbangan politik.

Dengan demikian meskipun WFP tidak menetapkan norma melalui perangkat hukum seperti organisasi politik, namun melalui aktivitasnya di lapangan. WFP berperan dalam pembentukan, penyebaran, dan penguatan norma-norma kemanusiaan global. Keempat norma utama yaitu kemanusiaan dan netralitas, kerja sama lintas aktor, kesetaraan gender, serta transparansi berbasis bukti menunjukkan bahwa fungsi normatif WFP di Palestina berjalan secara konsisten dengan mandatnya. Fungsi norma yang dijalankan WFP di Palestina berkontribusi terhadap pembentukan tatanan sosial yang lebih adil dan berorientasi pada kemanusiaan.

3.4 Operasional Bantuan WFP Melalui *Country Strategic Plan*

Dalam fungsi organisasi internasional yang ditulis oleh Clive Archer terdapat fungsi operasional yang mendeskripsikan bahwasannya organisasi internasional harus menjalankan sejumlah fungsi operasional. Fungsi tersebut dapat berupa penyedia bantuan, memberikan bantuan pengungsian, pengamat perdamaian PBB (Archer 2001, 107). Penerapan fungsi operasional yang dilakukan oleh WFP di Palestina merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Program kerja ini dirancang dalam bentuk rencana strategis yang mencakup periode tahun 2018 hingga 2022. Dalam konteks ini, WFP berfokus pada penciptaan luaran-luaran yang signifikan, yang tidak hanya berfungsi sebagai indikator keberhasilan, tetapi juga sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas bantuan yang diberikan.

Dalam mengupayakan keamanan pangan bagi Palestina, WFP membentuk rencana kerja bagi Palestina yang menghasilkan *Strategic Outcome 1: non-refugees, poor and severely food insecure people in Palestine (primarily in Gaza and Area C in the West Bank) have improved dietary diversity by 2022*, strategi ini memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan keamanan pangan bagi non-pengungsi, masyarakat miskin, dan masyarakat kerawanan pangan akut. Dalam menjalankan rencana kerja ini WFP membentuk strategi dan mengambil andil dalam intervensi utama dalam bentuk bantuan nyata. WFP memberikan bantuan pangan tanpa syarat, bantuan pangan langsung ini berupa paket makanan (tepung terigu, ikan kaleng, garam, minyak nabati, buncis, kacang-kacangan) (WFP 2018, 15). Selain dalam bentuk paket makanan WFP juga memberikan bantuan dalam bentuk CBT (*Cash Based Transfers*), bantuan CBT ini berbentuk

uang tunai dan voucher tunai. Pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai ini dinilai efektif dalam upaya peningkatan keamanan pangan Palestina karena berguna dalam mendukung perekonomian lokal. Sementara itu, melalui voucher tunai ini masyarakat Palestina dapat menukarkan voucher dengan berbagai jenis makanan di toko lokal yang bermitra dengan WFP.

Tabel 2. Distribusi Bantuan Pangan dan CBT Tahunan 2018-2022

Tahun	Total Aktual Bantuan Makanan (MT)	Total Aktual Bantuan Uang Tunai (USD)	Total Aktual Bantuan Voucher Tunai (USD)	Total Penerima Bantuan (Jiwa)
2018	13.457	0	26.590.441	353.617
2019	9.258	0	30.303.660	343.434
2020	7.769	1.009.002	41.828.714	431.862
2021	10.554	6.177.621	37.955.467	478.431
2022	8.020	270.642	37.900.220	380.593

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis dari tahun 2018-2022

Tabel diatas menunjukkan jumlah aktual dari distribusi bantuan pangan dan CBT WFP ke Palestina dalam kurun waktu 2018-2022 sesuai dengan keluaran capaian strategis 1 yang dibuat oleh WFP yang dijabarkan dalam annual report WFP. Pada tahun 2018 WFP menjangkau sebanyak 353.617 jiwa dalam distribusi bantuannya, tahun ini WFP mulai berfokus dalam menyalurkan bantuannya dalam bentuk CBT dan sebanyak 80% bantuan disalurkan dalam bentuk CBT pada tahun 2018 ini (WFP 2018, 17). Sementara WFP pada tahun 2018 juga berfokus dalam aspek lain seperti pelatihan pengembangan nutrisi dan gizi, namun dalam tahun 2018 ini terdapat kendala dalam keterbatasan dalam sumber daya dan

melonjaknya kebutuhan bantuan masyarakat Palestina sehingga menghambat pencapaian target.

Pada tahun 2019 memberikan bantuan kepada 343.434 jiwa dengan fokus terhadap perempuan dan anak-anak, tahun 2019 ini WFP menghadapi tantangan dalam keterbatasan dana. Hal ini berdampak pada penghapusan 25.000 jiwa di Tepi Barat dari daftar penerima manfaat (WFP 2019, 22). Tahun 2020 WFP telah menjangkau sebanyak 431.862 jiwa dalam alokasi bantuannya. Pada tahun ini juga terjadi pandemi COVID-19 sehingga WFP merespon dengan meningkatkan bantuan kepada 88.000 jiwa (WFP 2020). Dalam aspek lain pada tahun 2020 ini WFP meluncurkan skema pertanian tahan perubahan iklim guna meningkatkan mata pencaharian masyarakat Palestina. Tahun 2021 WFP mengirimkan bantuan kepada 478.431 jiwa dan pada tahun ini sumber bantuan mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya, bantuan tambahan berupa tunai multiguna darurat dialokasikan kepada 24.000 jiwa (WFP 2021, 31). Pada tahun 2022 sebagai tahun terakhir dari periode CSP, WFP berhasil menjangkau 380.593 jiwa dengan alokasi bantuannya. Meskipun ada pengurangan dalam jumlah bantuan dan total alokasi populasi jiwanya tetapi bisa dikatakan bahwasannya dari data tersebut WFP sangat konsisten dalam pemberian alokasi bantuan dari tahun 2018-2022. Hal tersebut membuktikan komitmen WFP dalam membantu Palestina dalam mengatasi kerawanan pangan.

Sementara dalam *Strategic Outcome 2: “Enhanced capacities of national institutions and systems to identify, target and assist food insecure vulnerable populations in Palestine by 2022”* merupakan cerminan nyata dari pelaksanaan fungsi operasional WFP sebagaimana dijelaskan oleh Clive Archer yang

menekankan peran organisasi internasional dalam pelaksanaan kegiatan teknis seperti bantuan kemanusiaan, asistensi teknis, pelatihan, serta koordinasi lintas aktor. Melalui *Strategic Outcome* ini WFP berperan tidak hanya sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelaksana teknis yang menyuarakan kebutuhan pemerintah Palestina dan mitra internasional sekaligus menggabungkan sumber daya, keahlian, dan dukungan dari berbagai lembaga donor serta badan PBB. Implementasi fungsi operasional ini terlihat melalui penyediaan pelatihan staf di Kementerian Pembangunan Sosial (MoSD) dan Biro Statistik Palestina (PCBS), penguatan sistem *Cash Based Transfers* (CBT), serta asistensi teknis untuk peningkatan analisis data dan penargetan populasi rentan terhadap kerawanan pangan (WFP 2022).

Pada periode 2018-2022 fungsi operasional WFP tampak dalam koordinasi lintas lembaga dan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pada tahun 2018-2019 WFP bekerja sama dengan MoSD dan PCBS untuk mengoperasionalkan sistem CBT dan memperkuat analisis data sembari mengagregasi dukungan UNICEF, UNRWA, dan Uni Eropa guna membangun sistem perlindungan sosial nasional (WFP 2019). Selama pandemi COVID-19 yaitu periode tahun 2020-2021, WFP memperluas fungsi operasionalnya dengan memimpin *SDG Joint Programme* bersama UNICEF, ILO, dan UN Women, serta menyediakan *platform* CBT bagi tujuh lembaga kemanusiaan lainnya (WFP 2021). Pada 2022, WFP memperdalam integrasi kelembagaan dengan Kementerian Sosial, Kesehatan, Pertanian, Pendidikan, dan Pertahanan Sipil Palestina melalui berbagai MoU yang berfokus pada kesiapsiagaan darurat dan sistem perlindungan sosial (WFP 2022). Dengan demikian, *Strategic Outcome 2*

menegaskan fungsi operasional WFP sebagai wadah artikulasi kebutuhan lokal dan agregasi kepentingan global.

Terakhir, dalam *Strategic Outcome 3 “Palestinians benefit from the services provided to partners through WFP’s delivery platform”* dalam *strategic* ini WFP bertindak sebagai pelaksana teknis yang mengoperasikan sistem bantuan lintas sektor melalui meminjamkan platform *Cash Based Transfers* (CBT) kepada mitranya. Melalui fungsi operasionalnya WFP memastikan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Palestina dengan menyediakan layanan teknis, sistem pembayaran digital, dan mekanisme pemantauan yang dapat digunakan bersama oleh berbagai lembaga kemanusiaan.

Tabel 3. Operasional WFP melalui Aktor Kemitraan dalam *Strategic Outcome 3*

Tahun	Aktor Kemitraan	Penerapan CBT WFP Terhadap Mitranya
2020	UNRWA, Terre des Hommes, Action Against Hunger, Islamic Relief Worldwide, UNICEF, Mercy Corps, UN Population Fund	<i>Platform</i> CBT WFP mendukung 7 lembaga kemanusiaan berbeda menyalurkan 1.028.836USD bantuan multi-sektoral selama COVID-19.
2021	UNSCO, UNICEF, UNFPA, Islamic Relief Worldwide, Terre des Hommes, SOS, ACTED, Global Communities, Action Against Hunger	SO3 baru diperkenalkan sebagai <i>strategic outcome</i> WFP. <i>Platform</i> WFP mendukung 9 lembaga PBB & LSM, menyalurkan 39.763.850USD bantuan lintas-sektoral (diterima oleh 743.700 orang). WFP memperluas opsi pembayaran (ATM, <i>cash-out</i>).

2022	UNSCO, UNICEF, UNFPA, Islamic Relief Worldwide, SOS Children's Villages, ACTED, Al Bayader International, UN-HABITAT	WFP menyalurkan 116.329.997USD bantuan lintas-sektoral (penerima 766.810 orang) atas nama 8 mitra. WFP memperluas opsi penarikan tunai.
------	--	---

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis dari tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas, peningkatan signifikan nilai dan jumlah penerima manfaat melalui *platform* WFP menunjukkan efektivitas fungsi operasionalnya dalam memperkuat respons kemanusiaan di Palestina. Pada 2020, *platform* ini menyalurkan USD 1.028.836 melalui tujuh lembaga mitra (WFP 2020), kemudian meningkat menjadi USD 39.763.850 untuk 743.700 penerima pada 2021 dan pada 2022 mencapai lebih dari USD 116 juta bagi 766.810 penerima (WFP 2022). Nilai ini merupakan jumlah tertinggi secara global dalam mendukung mitra WFP. Hal ini membuktikan bahwa *platform Cash Based Transfers* (CBT) telah menjadi sistem utama dalam penyaluran bantuan multisektoral. Peningkatan skala operasi ini juga mencerminkan kemampuan WFP dalam menjalankan fungsi operasionalnya sebagai pelaksana teknis dan koordinator sistemik, terutama dalam merespon pandemi COVID-19 serta eskalasi konflik di Gaza pada Mei 2021 dan Agustus 2022. Melalui mekanisme penyaluran terpusat yang efisien WFP berhasil mengurangi ketumpangtindihan dalam pengoperasian bantuan logistik, meningkatkan kecepatan distribusi, serta memastikan bahwa bantuan pangan dan tunai atau *voucher* dapat menjangkau kelompok paling rentan secara tepat waktu. Efisiensi ini menunjukkan bahwa fungsi operasional WFP tidak hanya mendukung kelancaran koordinasi lintas

lembaga tetapi juga secara langsung memperkuat ketahanan pangan dan kapasitas adaptif rumah tangga Palestina dalam menghadapi krisis.

3.4.1 Aktor Donor WFP ke Palestina Periode Tahun 2018-2022

Dalam pengoprasian batuan WFP guna mengatasi kerawanan pangan ke Palestina memerlukan dukungan finansial dari berbagai aktor donor internasional. Sebagaimana yang tercantum dalam *Country Strategic Plan (CSP)* WFP untuk Palestina (2018-2022), pembiayaan program-program kemanusiaan serta pembangunan kapasitas yang digagas oleh WFP merupakan sebuah bentuk dari *aggregation* kontribusi dari berbagai aktor negara, organisasi multilateral, dan entitas swasta. Terdapat beberapa aktor donor yang mengalokasikan dalam bentuk tunai USD kepada WFP guna disalurkan kepada populasi rentan pangan di Palestina.

Tabel 4. Aktor Donor untuk WFP di Palestina (Per 24 November 2022)

Donor	Allocated Contributions (USD)	Share of Needs Based Plan (%)
Belgium	2.293.578	0.5%
Canada	17.217.113	3.4%
European Commission	14.260.302	2.8%
Flexible Funding	55.806.225	11.0%
France	3.409.637	0.7%
Germany	59.264.322	11.7%
Japan	22.110.769	4.4%
Kuwait	100.000	0.0%
Miscellaneous Income	468.319	0.1%
Portugal	22.523	0.0%
Private Donors	3.715.743	0.7%

Republic Of Korea	1.500.000	0.3%
Resource Transfer	2.142.765	0.4%
Russian Federation	9.000.000	1.8%
Spain	1.898.671	0.4%
Switzerland	16.028.648	3.2%
UN Cerf	781.827	0.2%
UN Country Based Pooled Funds	4.141.884	0.8%
United Arab Emirates	7.397.770	1.5%
United Kingdom	11.951.357	2.4%
UN Other Funds and Agencies	715.307	0.1%
USA	41.392.046	8.2%

Sumber: Dokumen Dewan Eksekutif WFP 2022

Dari tabel tersebut menyajikan data alokasi dari berbagai kontribusi aktor donor kepada WFP guna keperluan pengoprasian distribusi bantuan ke Palestina per 24 November 2022. Dengan adanya data tersebut menjelaskan adanya transparansi dana dari berbagai aktor donor ke Palestina guna mendukung adanya program *Country Strategic Plan (CSP)* Palestina 2018-2022. Tabel diatas mengidentifikasi bahwasannya terdapat ragam sumber pendanaan dengan kontributor utama seperti Jerman, *Flexible Funding*, USA, Japan, Kanada yang menyumbangkan dana secara signifikan dari total dana yang terkumpul. Sumbangan dana dari berbagai aktor ini mencerminkan adanya komitmen global terhadap penanggulangan masalah kerawanan pangan di Palestina (WFP 2022). Hal ini menegaskan adanya tantangan berkelanjutan dalam mengamankan sumber daya yang memadai guna memenuhi kebutuhan yang telah direncanakan dalam *need based plan* WFP.

3.5 Peran Artikulasi dan Agregasi WFP Melalui *Country Strategic Plan* dan Kemitraan (2018-2022)

Menurut tulisan Clive Archer dalam fungsi *articulation* dan *aggregation* menjelaskan dan mengacu pada kemampuan organisasi untuk dapat menyuarakan dan menggabungkan kepentingan dari berbagai aktor, baik aktor negara maupun non-negara yang memiliki kepentingan yang sama (Archer 2001, 94). WFP dalam tujuannya untuk membantu mengurangi kerawanan pangan di Palestina WFP membentuk 2 program yang disebut *strategic outcome 2* dan *strategic outcome 3*. Dari kedua program tersebut WFP menunjukkan perannya tidak hanya sebagai penyalur bantuan tetapi juga sebagai wadah fasilitator dan koordinator dari berbagai aktor kemitraan.

Fungsi artikulasi dalam implementasi CSP Palestina 2018-2022 tercermin melalui serangkaian forum konsultasi yang digunakan WFP untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta otoritas Palestina. Salah satu forum utama yang digunakan adalah *Food Security Sector (FSS)*, yang dipimpin bersama oleh WFP dan *Food and Agriculture Organization (FAO)* sejak 2010. Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas lembaga antara WFP, *Ministry of Social Development (MoSD)*, *Ministry of Agriculture (MoA)*, serta mitra lokal seperti LSM dan kelompok masyarakat sipil. Melalui forum ini, WFP menghimpun data, masukan, dan prioritas kebijakan yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional (WFP 2018). Proses artikulasi tersebut juga dilakukan melalui sistem *Vulnerability Analysis and Mapping (VAM)*, yang secara berkala memantau tingkat kerentanan pangan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Gaza dan Tepi Barat. Hasil analisis ini kemudian disampaikan kepada pemerintah Palestina dan lembaga donor internasional untuk dijadikan

dasar dalam perencanaan program *Strategic Outcome 2* dan *Strategic Outcome 3*. Dengan kata lain, forum dan sistem ini berfungsi sebagai sarana artikulasi kepentingan masyarakat non-member dalam kebijakan WFP.

Keterkaitan antara fungsi artikulasi dan *Strategic Outcome 2* tampak jelas dalam upaya WFP memperkuat kapasitas nasional Palestina untuk mengidentifikasi dan membantu populasi rentan. *Strategic Outcome 2 “Enhanced capacities of national institutions and systems to identify, target and assist food insecure vulnerable populations in Palestine by 2022”* menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara WFP dan lembaga nasional dalam menentukan prioritas bantuan (WFP 2018). Melalui forum *Food Security Sector (FSS)*, hasil survei VAM, dan pertemuan tahunan dengan MoSD, WFP tidak hanya menyalurkan bantuan tetapi juga menampung aspirasi teknis dari lembaga nasional. Proses ini merupakan bentuk artikulasi kebijakan di mana kebutuhan lokal dikonversi menjadi program internasional yang terukur. Misalnya, WFP dan MoSD secara bersama menetapkan parameter kelayakan penerima manfaat dan melakukan harmonisasi antara sistem *Cash Based Transfer (CBT)* dengan *National Social Safety Net Programme (NSSNP)*. Hasil dari proses artikulasi tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam perencanaan operasional tahunan CSP melalui mekanisme agregasi yang menggabungkan masukan lokal dengan kebijakan donor internasional dalam satu kerangka yang disepakati.

Sementara itu, keterkaitan antara fungsi agregasi dan *Strategic Outcome 3* dapat dilihat dari peran WFP sebagai penyedia layanan logistik dan platform kemanusiaan bagi lembaga lain di Palestina. *Strategic Outcome 3 “Palestinians benefit from the services provided to partners through WFP’s delivery platform”*

menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada bantuan langsung tetapi juga pada efektivitas sistem koordinasi antar organisasi (WFP 2018). Dalam konteks ini, fungsi agregasi dijalankan WFP melalui penyediaan *delivery platform* yang memfasilitasi lembaga-lembaga mitra seperti FAO, UNRWA, dan UNICEF agar dapat menggunakan sistem logistik, transportasi, dan *payment mechanism* (CBT) milik WFP. Melalui kerja sama ini, berbagai kepentingan dan sumber daya dari lembaga berbeda diintegrasikan ke dalam satu sistem operasional terpadu, menciptakan sinergi kemanusiaan lintas lembaga. Agregasi semacam ini memungkinkan efisiensi penyaluran bantuan, pengawasan transparan, serta konsistensi kebijakan antar-aktor internasional yang bekerja di wilayah non-member seperti Palestina (WFP 2023).

Proses artikulasi dan agregasi juga didukung oleh forum formal seperti *Humanitarian Country Team* (HCT) dan *Annual Partnership Consultation* dimana WFP, pemerintah Palestina, dan donor internasional secara rutin membahas capaian serta hambatan implementasi CSP. Dalam forum ini pejabat WFP di Yerusalem dan Gaza berperan sebagai jembatan komunikasi antara kebutuhan lapangan dengan keputusan kebijakan di tingkat pusat (Delgado and Tschunkert 2022). Melalui mekanisme inilah aspirasi masyarakat lokal dapat diartikulasikan dan diagregasikan ke dalam sistem perencanaan global WFP. Dalam perspektif Archer pola ini menunjukkan bahwa organisasi internasional seperti WFP dapat berfungsi sebagai agen artikulasi dan agregasi kepentingan tanpa harus memberikan syarat keanggotaan formal bagi negara penerima bantuan.

Dengan demikian fungsi artikulasi dan agregasi dalam pelaksanaan CSP Palestina 2018-2022 menunjukkan keterkaitan langsung dengan *Strategic*

Outcome 2 dan *Strategic Outcome 3* yang menjadi dasar strategi WFP. Melalui *Strategic Outcome 2* WFP menyalurkan aspirasi dan memperkuat kapasitas nasional untuk mengidentifikasi dan melayani kelompok rentan (fungsi artikulasi), sementara melalui *Strategic Outcome 3* WFP mengintegrasikan berbagai sumber daya dan kepentingan lembaga mitra ke dalam sistem bantuan yang efisien dan inklusif (fungsi agregasi). Pola ini menggambarkan bahwa WFP bukan hanya pelaksana bantuan kemanusiaan, tetapi juga fasilitator proses politik dan administratif yang memastikan suara pihak non-member seperti Palestina tetap terwakili dalam kebijakan global. Dengan menjalankan kedua fungsi ini secara simultan. WFP memperkuat legitimasi dan efektivitasnya sebagai organisasi internasional yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika politik di wilayah konflik.

3.6 Peran WFP sebagai Sumber Informasi terkait Kerawanan Pangan Palestina

Organisasi internasional merujuk pada peran organisasi dalam menyediakan dan menyebarkan informasi yang relevan kepada negara-negara anggota dan publik (Archer 2001, 107). WFP menjalankan peran sebagai sumber informasi mengenai isu pangan di Palestina, yang secara konkret tercermin dalam kegiatan pengumpulan data primer yang sistematis dan berkelanjutan di lapangan. Seperti yang tercatat secara konsisten dalam *Country Strategic Plan Reports* untuk Palestina dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 seiring dengan memburuknya situasi sosial-ekonomi di Gaza yang diperparah oleh eskalasi konflik, WFP mengintensifkan kegiatan pengumpulan data melalui *Vulnerability Analysis and Mapping* (VAM).

Dalam menjalankan operasionalnya World Food Programme (WFP) membagikan informasi melalui berbagai media digital dan saluran resmi untuk memastikan transparansi serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Palestina. WFP menggunakan sistem berbasis data seperti Vulnerability Analysis and Mapping (VAM) dan mobile VAM (mVAM) yang menyajikan informasi real time mengenai kondisi kerawanan pangan dan kebutuhan masyarakat rentan. Selain itu, WFP juga memanfaatkan platform resmi seperti situs web, Annual Country Report, dan portal data terbuka untuk menyebarkan hasil survei, laporan evaluasi program, serta pembaruan mengenai respons kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat (WFP 2022). Melalui mekanisme ini, WFP tidak hanya menyediakan data bagi publik dan lembaga donor, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan institusi nasional serta badan PBB lain agar kebijakan dan intervensi bantuan tetap berbasis bukti.

Pemanfaatan media sosial juga menjadi bagian penting dari strategi komunikasi WFP dalam menyebarkan informasi terkait situasi kerawanan pangan di Palestina. Melalui platform seperti Instagram, X, Facebook, dan YouTube WFP secara rutin mengunggah laporan visual, infografis, dan *storytelling* kemanusiaan yang menyoroti data terbaru tentang ketahanan pangan, kondisi pengungsi, serta efektivitas program bantuan. Informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik global, menarik dukungan donor, dan memperkuat transparansi terhadap pelaksanaan program. Media sosial juga digunakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya nutrisi, ketahanan pangan, serta peran WFP dalam tanggap darurat, sehingga menjadi jembatan komunikasi antara lembaga internasional, mitra lokal, dan masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian,

media sosial berfungsi tidak hanya sebagai alat diseminasi, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi kemanusiaan dan advokasi publik bagi misi WFP di Palestina.

Namun, dalam prakteknya proses sharing informasi di Palestina menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Kondisi politik yang tidak stabil, keterbatasan infrastruktur digital akibat blokade serta risiko keamanan data seringkali menghambat penyebaran informasi secara tepat waktu. Koordinasi antar lembaga kemanusiaan juga kerap menghadapi hambatan dalam menjaga konsistensi data dan pesan publik, terutama ketika menghadapi situasi darurat seperti konflik bersenjata atau krisis pangan mendadak. Selain itu, WFP menghadapi masalah *donor fatigue* dan *information overload* di mana banyaknya laporan dan data yang beredar dapat mengurangi efektivitas komunikasi serta perhatian publik terhadap isu kerawanan pangan (Sandvik 2011). Meskipun demikian, sistem digital dan jejaring sosial yang dimanfaatkan WFP tetap menjadi komponen penting dalam mendukung transparansi, kolaborasi, dan efektivitas fungsi operasionalnya di Palestina.

Tabel 5. Fungsi Informasi WFP di Palestina (2018-2022)

Tahun	Implementasi Fungsi Informasi oleh WFP	Transformasi Informasi Terhadap Kemitraan dan Publik	Dampak terhadap Pengambilan Keputusan
2018	Intensifikasi pengumpulan data VAM, penyebaran data kuantitatif dan kualitatif tentang peningkatan rawan pangan.	Data dikonversi menjadi laporan visual dan infografis digital di situs resmi serta media sosial untuk menarik perhatian donor dan mitra	Menjadi instrumen advokasi utama untuk memobilisasi dana darurat dari negara donor.

		internasional.	
2019	Penggunaan data jangka panjang untuk menunjukkan kebutuhan bantuan berkelanjutan.	Informasi VAM diintegrasikan dalam publikasi daring dan kampanye digital yang menekankan urgensi dukungan jangka panjang.	Memperkuat argumen untuk pendanaan jangka panjang dan menjadi dasar perencanaan strategis WFP.
2020	Adaptasi metode dengan survei jarak jauh (mVAM) untuk memantau dampak pandemi terhadap ketahanan pangan.	Data hasil mVAM diubah menjadi pembaruan interaktif melalui dashboard daring dan unggahan media sosial saat pandemi COVID-19.	Menginformasikan penyesuaian program bantuan (seperti bantuan tunai) untuk merespon dampak ekonomi.
2021	Pelaksanaan <i>rapid needs assessments</i> dan penyebaran informasi <i>real time</i> mengenai kebutuhan darurat.	Hasil <i>rapid needs assessments</i> dibagikan melalui unggahan cepat di media sosial seperti instagram dan X dan rilis digital untuk memastikan koordinasi lintas lembaga secara waktu nyata.	Mengarahkan alokasi bantuan darurat internasional secara cepat dan terkoordinasi.
2022	Advokasi bertarget dengan menyajikan data efektivitas dan efisiensi program (seperti dampak bantuan tunai).	Informasi dikemas dalam laporan multimedia dan kampanye digital yang menunjukkan “return on investment” untuk mempertahankan dukungan donor	Mempertahankan tingkat pendanaan dengan menunjukkan “ <i>return on investment</i> ” dan akuntabilitas.

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis dari tahun 2018-2022

Transformasi informasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5 memperlihatkan bagaimana World Food Programme (WFP) mengembangkan fungsi informasinya menjadi bagian penting dari fungsi operasional organisasi internasional. WFP memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk

mentransformasi data lapangan menjadi instrumen kebijakan dan advokasi global. Melalui sistem seperti *Vulnerability Analysis and Mapping* (VAM) dan *mobile VAM* (mVAM), data yang dikumpulkan secara kuantitatif diubah menjadi informasi visual interaktif, laporan daring, serta konten media sosial yang mudah diakses publik. Proses ini memungkinkan informasi kemanusiaan yang semula bersifat teknis menjadi sarana komunikasi strategis bagi donor, pemerintah, dan masyarakat internasional.

Pemanfaatan media sosial seperti Instagram, X, Facebook, dan YouTube memperkuat dimensi transformasional dari fungsi informasi WFP. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai kanal publikasi, tetapi juga sebagai alat koordinasi cepat dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19 dan eskalasi konflik di Gaza pada 2021. Melalui unggahan data real time, infografis, dan *storytelling* kemanusiaan, WFP berhasil membangun narasi berbasis bukti yang memperkuat legitimasi program dan mendorong kolaborasi antar mitra kemanusiaan. Dengan demikian transformasi informasi melalui digitalisasi dan media sosial menjadikan WFP bukan sekadar pelaksana bantuan pangan, melainkan aktor operasional yang mengintegrasikan fungsi komunikasi strategis, advokasi kebijakan, dan transparansi publik dalam mendukung efektivitas penanganan kerawanan pangan di Palestina.

3.7 Tantangan WFP di Palestina dan Analisis Pembeding terhadap Implementasi WFP

Pelaksanaan program World Food Programme (WFP) di Palestina menghadapi sejumlah tantangan kompleks yang bersumber dari faktor politik, ekonomi, dan operasional di wilayah tersebut. Pertama, tantangan politik dan

keamanan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi seluruh rantai operasional. Kondisi pendudukan militer, blokade di Gaza, dan kepecahan otoritas pemerintahan antara Hamas di Gaza dan Otoritas Palestina di Tepi Barat menyebabkan WFP seringkali kesulitan mengakses wilayah tertentu, baik untuk distribusi bantuan maupun pengumpulan data lapangan (WFP 2021). Pembatasan pergerakan logistik di perbatasan menyebabkan keterlambatan penyaluran bantuan dan meningkatnya biaya operasional. Selain itu, eskalasi kekerasan seperti konflik Mei 2021 dan Agustus 2022 menimbulkan kerusakan infrastruktur dan menghambat implementasi proyek *Cash Based Transfer* (CBT) maupun kegiatan penguatan sistem sosial.

Tantangan kedua yaitu ekonomi dan ketergantungan pada pendanaan donor internasional menjadi isu yang berkelanjutan. Fluktuasi kontribusi donor terutama akibat ketegangan geopolitik dan perubahan prioritas negara penyumbang berdampak langsung pada skala program bantuan. Dalam beberapa periode WFP terpaksa mengurangi jangkauan penerima manfaat atau menyesuaikan jenis bantuan (WFP 2022). Hal ini menuntut fleksibilitas tinggi dalam perencanaan anggaran serta inovasi dalam mobilisasi dana melalui *joint programmes* bersama lembaga lain seperti UNICEF, ILO, dan UN Women. Ketiga, terdapat tantangan teknis dan kelembagaan terutama dalam sistem pengumpulan dan penyebaran data. Implementasi *Vulnerability Analysis and Mapping* (VAM) dan *mobile VAM* (mVAM) menghadapi keterbatasan jaringan komunikasi, keamanan lapangan, dan keterampilan teknis mitra lokal. Selain itu, koordinasi data antara lembaga nasional seperti PCBS dan Kementerian Pembangunan Sosial (MoSD) sering terhambat oleh perbedaan kapasitas dan

prosedur birokrasi. WFP harus berinvestasi dalam pelatihan staf nasional, pengembangan dashboard digital, serta pemantauan berbasis *real time* untuk memastikan integritas data (WFP 2021). Tantangan lain muncul dalam komunikasi publik dan penyebaran informasi dimana WFP perlu menjaga keseimbangan antara transparansi, akurasi data, dan sensitivitas politik di media sosial serta laporan publik.

Tantangan terakhir, yaitu tantangan terkait sosial dan persepsi publik turut mempengaruhi efektivitas program. Sebagian masyarakat memandang bantuan internasional bersifat sementara dan tidak memberdayakan, sementara kelompok lain menilai distribusi bantuan sering tidak merata karena keterbatasan mekanisme penargetan. Untuk menjawab persepsi ini, WFP mulai mengoptimalkan penggunaan media sosial dan komunikasi digital dalam menyebarkan informasi tentang program bantuan, hasil *assessments* ketahanan pangan, dan dampak sosial ekonomi dari bantuan tunai. Melalui kanal resmi seperti Instagram, X, Facebook, dan situs web regional WFP membagikan hasil *food security bulletins*, laporan *rapid needs assessment*, dan infografis tentang efektivitas program. Pemanfaatan media sosial ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas publik, tetapi juga berfungsi sebagai alat advokasi kepada donor dan masyarakat internasional untuk memperkuat dukungan terhadap program di Palestina (WFP 2022).

Jika dibandingkan dengan organisasi lain di Palestina seperti *United Nations Relief and Works Agency* (UNRWA) dan UNICEF, WFP memiliki posisi yang berbeda dalam fungsi operasionalnya. UNRWA berfokus pada pelayanan langsung terhadap pengungsi Palestina (pendidikan, kesehatan, pembangunan), sedangkan WFP berperan sebagai koordinator sistem ketahanan pangan nasional

dengan menekankan bantuan berbasis data dan *platform* CBT. UNICEF lebih menitikberatkan pada intervensi gizi anak dan perempuan sementara WFP menyediakan *platform* yang memungkinkan integrasi program lintas lembaga, seperti *Joint SDG Fund Programme* untuk membangun *Social Protection Floor*. Dengan demikian, tantangan utama bagi WFP bukan hanya pada aspek pendanaan atau distribusi, tetapi juga dalam menjaga konsistensi koordinasi antar lembaga dan efektivitas sistem berbasis data di tengah situasi politik yang tidak stabil.

Sedangkan jika dibandingkan dengan operasi WFP di negara lain seperti Yaman dan Lebanon, pendekatan di Palestina menunjukkan karakter yang lebih sistemik dan berbasis teknologi. Di Yaman, tantangan utama WFP terletak pada keamanan fisik dan hambatan distribusi akibat perang saudara, sehingga program masih berfokus pada *food basket assistance* dan *emergency logistics* (WFP 2020). Di Lebanon, WFP lebih menekankan pada stabilitas ekonomi pengungsi Suriah melalui kerja sama dengan bank lokal dalam bentuk *e-voucher* dan *cash card*. Namun di Palestina WFP berhasil mengintegrasikan pendekatan teknis, kebijakan sosial, dan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah nasional. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi operasional WFP di Palestina lebih matang dan adaptif karena tidak hanya menyalurkan bantuan tetapi juga memperkuat struktur kelembagaan nasional dalam pengelolaan data, perlindungan sosial, dan manajemen krisis pangan. Dengan demikian, analisis perbandingan ini memperjelas posisi WFP di Palestina sebagai organisasi kemanusiaan yang menjalankan peranannya di Palestina paling komprehensif di antara negara-negara krisis lain. WFP tidak hanya menghadapi tantangan ekstrem akibat blokade dan instabilitas politik, tetapi juga menampilkan inovasi struktural melalui integrasi

data, koordinasi lintas lembaga, dan komunikasi publik digital. Pendekatan ini menempatkan WFP di Palestina sebagai model operasional yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi sistem dalam konteks kemanusiaan modern.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji peran World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina selama periode 2018-2022. Isu kerawanan pangan di wilayah ini merupakan krisis kemanusiaan yang konsisten dan memerlukan perhatian internasional yang berkelanjutan. Untuk menganalisis peran WFP, penelitian ini secara khusus menerapkan lima fungsi dari teori Organisasi Internasional Clive Archer yaitu fungsi *Rule Making*, *Norms*, *Operation*, *Articulation and Aggregation*, serta *Information*. Pemilihan fungsi-fungsi ini secara strategis merefleksikan fokus pada aspek-aspek yang berorientasi pada tindakan dan fasilitasi dari peran WFP. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efikasi praktis WFP dalam konteks kemanusiaan yang kompleks, dengan menitikberatkan pada bagaimana WFP memberikan bantuan dan mengkoordinasikan situasi di lapangan sehingga berkontribusi pada literatur mengenai efektivitas organisasi internasional dalam krisis kemanusiaan.

Kerawanan pangan di Palestina merupakan masalah kompleks yang diperparah oleh konflik berkepanjangan, masalah perekonomian, dan dampak pandemi COVID-19. Data menunjukkan bahwa jumlah populasi yang mengalami kerawanan pangan berfluktuasi namun tetap pada tingkat yang mengkhawatirkan, puncaknya hingga 2 juta jiwa pada tahun 2020. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 dan 2022, namun jumlah ini masih jauh dari ambang batas normal dan konsisten dengan statusnya sebagai "kerawanan pangan besar"

sejak 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kerawanan pangan di Palestina adalah masalah yang bersifat berkelanjutan dan struktural bukan hanya sekedar serangkaian peristiwa sementara. Penurunan populasi kerawanan yang sedikit tidak boleh diartikan sebagai pemulihan signifikan melainkan sebagai stabilisasi pada tingkat kerawanan yang parah. Efek gabungan dari berbagai krisis ini memperburuk lingkaran kerentanan pangan. Situasi kerawanan pangan ini menunjukkan pentingnya respon kemanusiaan yang menyeluruh dan multi-sektoral yang mempertimbangkan interaksi kompleks dari berbagai faktor dalam krisis yang berkepanjangan. WFP sendiri telah hadir di Palestina sejak tahun 1991 dan terus beradaptasi dengan kondisi yang semakin memburuk ini.

Analisis menunjukkan bahwa World Food Programme (WFP) berperan signifikan dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina melalui penerapan fungsi-fungsi organisasi internasional sebagaimana dikemukakan oleh Clive Archer. Melalui fungsi *rule making*, WFP membentuk kerangka hukum dan kebijakan operasional yang mendasari terbentuknya *Country Strategic Plan (CSP)* 2018-2022 di Palestina yang memperoleh legitimasi dari *Executive Board*. Dalam fungsi norma, WFP menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, netralitas, kesetaraan gender, kerjasama lintas aktor, serta transparansi berbasis data sebagai standar perilaku global di Palestina. Melalui fungsi operasional, WFP secara langsung menyalurkan bantuan pangan dan transfer tunai (CBT) kepada ratusan ribu penerima manfaat guna memperkuat ketahanan pangan. Sementara itu, fungsi artikulasi dan agregasi dijalankan melalui forum seperti *Food Security Sector (FSS)* dan kemitraan lintas lembaga, yang memungkinkan integrasi aspirasi lokal dengan kebijakan internasional. Terakhir, fungsi informasi dijalankan melalui

sistem *Vulnerability Analysis and Mapping* (VAM) sebagai sumber data utama untuk kebijakan pangan berbasis bukti. Secara keseluruhan, WFP berperan tidak hanya sebagai pelaksana bantuan kemanusiaan, tetapi juga sebagai aktor normatif, koordinatif, dan informatif yang memperkuat tata kelola kemanusiaan global di wilayah konflik non-member seperti Palestina.

WFP memainkan peran yang responsif dalam mengatasi kerawanan pangan di Palestina. Dalam fungsi operasionalnya WFP secara konsisten menyalurkan bantuan pangan langsung dan Transfer Berbasis Tunai (CBT) dalam skala besar, berhasil menjangkau ratusan ribu individu setiap tahunnya. Pergeseran strategis menuju CBT dan peningkatan respon yang cepat selama krisis pandemi COVID-19 dan peningkatan konflik menunjukkan pendekatan kemanusiaan yang cangguh dan responsif yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memberdayakan penerima manfaat dan berpotensi menstimulasi ekonomi lokal. Fungsi artikulasi dan agregasi WFP terbukti krusial dimana organisasi ini secara efektif menyuarakan kebutuhan populasi rentan dan menyatukan kepentingan berbagai institusi nasional serta mitra internasional melalui program-program strategis seperti *Country Strategic Plan Strategic Outcome 2* dan *3*. Perannya sebagai *platform* pengiriman terpusat untuk bantuan multi-sektoral yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam nilai dan jumlah penerima manfaat yang dicapai melalui mitra. Hal ini menandai evolusi WFP dari sekedar pelaksana hingga menjadi penyedia infrastruktur penting bagi komunitas kemanusiaan yang lebih luas di Palestina. Terakhir, fungsi informasi WFP sangat vital, organisasi ini bertindak sebagai sumber terpercaya melalui pengumpulan data sistematis (VAM, mVAM) dan penilaian waktu nyata. Informasi ini menjadi

instrumen advokasi yang kuat, memfasilitasi mobilisasi sumber daya, dan memandu intervensi kemanusiaan berbasis bukti yang sangat penting untuk mempertahankan tingkat pendanaan dan akuntabilitas di tengah tantangan seperti "*donor fatigue*" global.

4.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi untuk penelitian di masa depan guna memperdalam pemahaman tentang aksi kemanusiaan di tengah konflik yang berkepanjangan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, perlu dilakukan evaluasi kuantitatif dan kualitatif mengenai dampak jangka panjang dari *Cash Based Transfers* (CBT) khususnya terhadap ketahanan pangan rumah tangga, variasi konsumsi makanan, dan pembangunan kapasitas pasar lokal di Palestina. Selanjutnya, fokus pada keberlanjutan peningkatan kapasitas institusi nasional, dengan menilai seberapa efektif institusi Palestina dapat beroperasi secara mandiri setelah intervensi dari WFP serta tantangan struktural yang dihadapi dalam mempertahankan kapasitas tersebut. Selain itu, penelitian juga harus menyelidiki mekanisme pendanaan inovatif dan strategi advokasi yang lebih efektif untuk mengatasi fenomena "*donor fatigue*" dalam krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, termasuk peran aktor non-tradisional. Di sisi lain, analisis komprehensif mengenai peran teknologi dalam bantuan kemanusiaan juga diperlukan dengan mempertimbangkan implikasi etis, keamanan data, dan skalabilitas penggunaan teknologi seperti survei jarak jauh (mVAM) dalam penyaluran dan pemantauan bantuan di zona konflik. Terakhir, melakukan analisis komparatif terhadap peran dan efektivitas WFP dibandingkan dengan organisasi lain di Palestina

menggunakan kerangka teori yang sama dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik, sinergi, atau kesenjangan dalam respon kemanusiaan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Ahmadi, Davod, and Hugo Melgar-Quiñonez. 2019. "Determinants of Food Insecurity in Occupied Palestinian Territory: A Cross-Sectional Survey." *The Lancet* 393 (March): S4. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30590-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30590-2).
- Amnesty International. 2018. "Gaza's 'Great March of Return,' Six Months On." *Amnesty International*, October 19. <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/10/gaza-great-march-of-return/>.
- Anabtawi, Ola, Ayah Abu-Farha, Basma Shwaikeh, Saly Shanik, Tala Eid, Aya Ibrahim, and Manal Badrasawi. "Cross-sectional study of the potential effects of October 2023 war on food security in the State of Palestine." *Eastern Mediterranean Health Journal* 31, no. 2 (2025).
- Anderson, Sandra A. 1990. "Toward a National Definition of Food Security: Food Security and Hunger." Washington, DC: Food and Nutrition Service, United States Department of Agriculture. In *Measuring Food Insecurity and Hunger: Phase 1 Report*. National Academies Press.
- Asi, Yara M. 2020. "Journal of Peacebuilding & Development." *Achieving Food Security Through Localisation, Not Aid: "De-development" and Food Sovereignty in the Palestinian Territories* 15, no. 2 (Agustus): 14. <https://doi.org/10.1177/1542316620918555>.
- Delgado, C., and K. Tschunkert. 2022. "Food Security in Conflict and Peacebuilding Settings: Beyond a Humanitarian Concern." *Pathways to Peace and Security*, no. 2: 38–61. <https://doi.org/10.20542/2307-1494-2022-2-38-61>.
- Duffield, Stephen M., and S. Jonathan Whitty. 2016. "Application of the Systemic Lessons Learned Knowledge Model for Organisational Learning through Projects." *International Journal of Project Management* 34 (7): 1280–93. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.07.001>.
- Hassoun, Abdo, Fatma Boukid, and Fatih Ozogul. 2024. "Editorial: Food Sustainability and Food Industry 4.0: Unveiling the Relationship." *Frontiers in Sustainable Food Systems* 8 (July). <https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1440023>.

- Humanitarian Practice Network. 2004. Food Security in the Occupied Palestinian Territory. HPN Paper No. 48. London: Overseas Development Institute. Accessed October 7, 2025. <https://odihpn.org/en/publication/food-security-in-the-occupied-palestinian-territory/>
- Lin, Tracy Kuo, Rawan Kafri, Weeam Hammoudeh, et al. 2022. "Pathways to Food Insecurity in the Context of Conflict: The Case of the Occupied Palestinian Territory." *Conflict and Health* 16 (1): 38. <https://doi.org/10.1186/s13031-022-00470-0>.
- Magdalena, Maria. 2022. "Peran World Food Programme (WFP) dalam menangani persoalan pangan di Lebanon tahun 2020." *JOM FISIP* 9 (Edisi II Juli-Desember): 16.
- Mamad, Firdaus S., Johan S. Putra, Reni Saaulia, and Sulfina Adnis. 2020. "Yasser Arafat dan Konflik Palestina-Israel." *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 10 (Januari): 12.
- Prawira, Indra, Rahmat Edi Irawan, and Karen Karen. 2021. "OBJEKTIVITAS TIGA MEDIA SIBER INDONESIA: STUDI KONTEN BERITA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA | Prawira | JWP (Jurnal Wacana Politik)." <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/35073>.
- Romanoa, Donato, Gianluca Stefania, Benedetto Rocchia, and Ciro Fiorillo. 2019. The impact of assistance on poverty and food security in a fragile and protracted-crisis context: the case of West Bank and Gaza Strip 8:61. <https://dx.doi.org/10.13128/bae-8145>.
- Sifana, Firdha, Fiqih D. Alamsyah, Max D. Simanjuntak, and Ridha Wahyuni. 2024. "Analisis Konflik Israel-Palestina Ditinjau dari Perspektif Instrumen HAM Internasional." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2 (Juni): 8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11464763>.
- Syari'ah, Atiris, Nafa Nabilah, and Rizki Wijayanti. 2022. "KEKEJAMAN ISRAEL TERHADAP RAKYAT PALESTINA: Telaah Berita-Berita CNN Indonesia Tahun 2019-2021." *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 1 (1): 1. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v1i1.1039>.
- Zaini, Nur Hidayah, Wan Hasmat Wan Hasan, Afzan Nor Talib, and Dr. Shafinar Ismail. 2019. "FOOD INSECURITY: THE AFFECTS OF SOCIOECONOMIC AND FOOD CONSUMPTION." *Humanities &*

Buku

Archer, Clive. 2001. *International Organizations*. 3rd ed. 203 vols. London: Routledge.

Behaviours, and References.” In *The Routledge Handbook of Contemporary Art in Global Asia*. Routledge.

Sharaf, Rawan. 2022. “Palestinian International Exhibitions: From Universal Resistance to Global Nomadism – The Case of Qalandiya International: Qalandiya International: A Genealogy of Institutional Patterns,

Laporan

Dewan Ketahanan Pangan. 2006. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (Food Security and Vulnerability Atlas)*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, dan World Food Programme (WFP).

FAO. n.d. “Hunger and Food Insecurity | FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations.” *HungerAndFoodInsecurity*. Accessed December 16, 2024. <https://www.fao.org/hunger/en>.

FSIN. n.d. “2021 | Food Security Information Network (FSIN).” Accessed August 8, 2025. <https://www.fsinplatform.org/taxonomy/term/294>.

FSIN. 2019. “Global Report on Food Crises 2019 | Food Security Information Network (FSIN).” <https://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2019>.

FSIN. 2023. *Global Report on Food Crises (GRFC) 2023*. May 3. <https://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2023>.

FSIN. n.d.-a. *2022 Global Report on Food Crises*.

FSIN. n.d.-b. “Global Report on Food Crises 2020 | Food Security Information Network (FSIN).” Accessed August 8, 2025. <https://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2020>.

- HNO. 2020. “Humanitarian Response Plan 2021.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory, December 15.
<http://www.ochaopt.org/content/humanitarian-response-plan-2021>.
- OCHA. 2018. “Humanitarian Response Plan 2019.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory, December 17.
<http://www.ochaopt.org/content/humanitarian-response-plan-2019>.
- OCHA. 2021. “OCHA Annual Report 2020 | OCHA.” June 18.
<https://www.unocha.org/publications/report/world/ocha-annual-report-2020>.
- OCHA. 2022. “OCHA Annual Report 2021 | OCHA.” June 21.
<https://www.unocha.org/publications/report/world/ocha-annual-report-2021>.
- United Nations General Assembly (UNGA). 2012. Resolution 67/19: Status of Palestine in the United Nations. New York: United Nations.
- WFP. 1962/2020. *General Regulations and Rules of the World Food Programme*. Rome: WFP Executive Board.
- World Food Programme (WFP). 2020. *Protection and Accountability Policy 2020*. Rome: WFP.
- WFP. 2017. State of Palestine Country Strategic Plan (2018–2022). October 31.
- WFP. 2017. “State of Palestine county strategic plan (2018-2023).” Saving Lives Changing Lives.
<https://www.wfp.org/operations/ps01-state-palestine-county-strategic-plan-2018-2023>.
- WFP. “Annual Country Report | World Food Programme 2018.”
https://www.wfp.org/operations/annual-country-report?operation_id=PS01&year=2018.
- WFP. “Annual Country Report | World Food Programme 2019.”
https://www.wfp.org/operations/annual-country-report?operation_id=PS01&year=2019.

WFP. “Annual Country Report | World Food Programme 2020.”
https://www.wfp.org/operations/annual-country-report?operation_id=PS01&year=2020.

WFP. “Annual Country Report | World Food Programme 2021.”
https://www.wfp.org/operations/annual-country-report?operation_id=PS01&year=2021#/23031.

WFP. “Annual Country Report | World Food Programme 2022.”
https://www.wfp.org/operations/annual-country-report?operation_id=PS01&year=2022.

WFP. 2022. *Vulnerability Analysis and Mapping (VAM) Palestine Report*. Rome: WFP.

WFP&UNICEF. 2020. “WFP Palestine - Barrier Analysis & In-Depth Qualitative Interviews Report - April 2020 | World Food Programme.” August 5.
<https://www.wfp.org/publications/wfp-palestine-barrier-analysis-depth-qualitative-interviews-report-april-2020>.

World Bank. 2019. “Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee.” Text/HTML. World Bank.
<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/410061568815090051/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee>.

World Bank. 2023. *Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee: Reform Momentum Needed to Counter Economic Distress*. Washington, DC: World Bank.
<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099329023052922766/p1776460d699ac0cf08c980de6c3dc9d63f>

WFP. 2023. *Palestine Country Brief*. Rome: World Food Programme. Accessed October 7, 2025.
<https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/wfp-palestine-country-brief-august-2023>

Artikel Daring

AJLabs. n.d. “Israel-Gaza War in Maps and Charts: Live Tracker.” Al Jazeera. Accessed December 16, 2024.

<https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker>.

Kementerian Pertanian DJTP. 2022. “Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.” Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. <https://tanamanpangan.pertanian.go.id/detil-konten/iptek/63>.

Majeda El Batsh. 2020. “Palestinians Confirm 7 Coronavirus Cases, Declare Tourist Ban.” The Times of Israel, March 5. <https://web.archive.org/web/20200403011045/https://www.timesofisrael.com/palestinians-confirm-7-coronavirus-cases-declare-tourist-ban/>.

PCBS (Palestinian Central Bureau of Statistics). 2024. Palestine in Figures 2023. Ramallah: Palestinian Central Bureau of Statistics. <https://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=4498>

United Nations General Assembly. “Status of Palestine in the United Nations.” *Resolution 67/19*, December 4, 2012.

VOA Indonesia. 2020. “Ketahanan Pangan di Gaza yang Rawan Semakin Memburuk akibat Pandemi.” VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/ketahanan-pangan-di-gaza-yang-rawan-semakin-memburuk-akibat-pandemi/5595723.html>.

VOA Indonesia. 2024. “Rawan Pangan di Gaza, Anak-anak Kelaparan Penuhi Bangsal Rumah Sakit.” VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/rawan-pangan-di-gaza-anak-anak-kelaparan-penuhi-bangsal-rumah-sakit/7535053.html>.

WHO. 2023. “Cross-Sectional Study of the Potential Effects of October 2023 War on Food Security in the State of Palestine.” World Health Organization - Regional Office for the Eastern Mediterranean. <http://www.emro.who.int/emhj-volume-31-2025/volume-31-issue-2/cross-sectional-study-of-the-potential-effects-of-october-2023-war-on-food-security-in-the-state-of-palestine.html>.

WHO. “COVID-19 Cases | WHO COVID-19 Dashboard.” Datadot. Accessed August 8, 2025. <https://data.who.int/dashboards/covid19/cases>.

World Food Programme. *Palestine Country Strategic Plan (2018–2022)*. Rome: WFP, 2018.

- World Food Programme. *State of Food Security and Nutrition in the World 2022*. Rome: WFP, 2022.
- WFP. 2023. “WFP Sounds Alarm on Food Security amid Conflict in Israel and Palestine, Urges Immediate Humanitarian Access.” World Food Programme.
<https://www.wfp.org/news/wfp-sounds-alarm-food-security-amid-conflict-israel-and-palestine-urges-immediate-humanitarian>.
- WFP. 2025. “Palestine.” World Food Programme, March 27.
<https://www.wfp.org/countries/palestine>.
- World Bank. 2019. “Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee.” World Bank.
<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/410061568815090051/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee>.
- World Bank. 2024. “Unemployment, Total (% of Total Labor Force) (National Estimate) - West Bank and Gaza | Data.” World Bank Open Data.
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=PS>
- World Bank. n.d. “World Bank Open Data.” World Bank Open Data. Accessed August 8, 2025. <https://data.worldbank.org>.